



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN PAJAK ROKOK UNTUK PENDANAAN
PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif melalui pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 791);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN PAJAK ROKOK UNTUK PENDANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat bertujuan untuk memberikan acuan kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif melalui penerimaan pajak rokok, sehingga menjadi tepat guna, tepat sasaran, dan dapat memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal.

Pasal 2

- (1) Penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat digunakan untuk kegiatan:
 - a. penurunan faktor risiko penyakit tidak menular;
 - b. penurunan faktor risiko penyakit menular termasuk imunisasi;
 - c. peningkatan promosi kesehatan;
 - d. peningkatan kesehatan keluarga;
 - e. peningkatan gizi;

- f. peningkatan kesehatan lingkungan;
 - g. peningkatan kesehatan kerja dan olah raga;
 - h. peningkatan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya; dan
 - i. pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
- (2) Selain digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pajak rokok dapat digunakan untuk peningkatan pembangunan dan pemeliharaan gedung Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas).
- (3) Penggunaan pajak rokok untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari alokasi yang ditetapkan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelompok sasaran yang meliputi pemerintah, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, organisasi/asosiasi profesi, lembaga/organisasi masyarakat, dunia usaha/swasta, media massa, dan pemangku kepentingan lain yang terkait.

Pasal 3

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menggunakan strategi:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. advokasi;
- c. kemitraan;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dan nonkesehatan; dan/atau
- e. pemenuhan sarana dan prasarana promotif dan preventif untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar penggunaan pajak rokok untuk pendanaan pelayanan kesehatan masyarakat menjadi tepat guna, tepat sasaran, dan dapat memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. advokasi dan sosialisasi; dan/atau
 - b. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1500

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN PAJAK
ROKOK UNTUK PENDANAAN PELAYANAN
KESEHATAN MASYARAKAT

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN PAJAK ROKOK
UNTUK PENDANAAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*), pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu kebijakan yang diatur dalam undang undang ini adalah penambahan jenis pajak daerah baru, yaitu pajak rokok.

Pajak rokok merupakan salah satu jenis pajak daerah. Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah pusat yang kemudian disetor ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. pajak rokok ini akan masuk ke RKUD Provinsi sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi dan akan ditransfer ke kabupaten/kota.

Selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tujuan utama penerapan pajak rokok adalah untuk mengurangi konsumsi rokok, mengurangi peredaran rokok illegal, serta melindungi masyarakat atas bahaya rokok. Penerapan pajak rokok dimaksudkan juga untuk mengoptimalkan pelayanan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan kesehatan masyarakat.

Kebijakan tentang pajak rokok diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tarif pajak rokok sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Pasal 94 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini mengatur

bahwa 70% (tujuh puluh persen) hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota dan 30% (tiga puluh persen) diserahkan kepada provinsi.

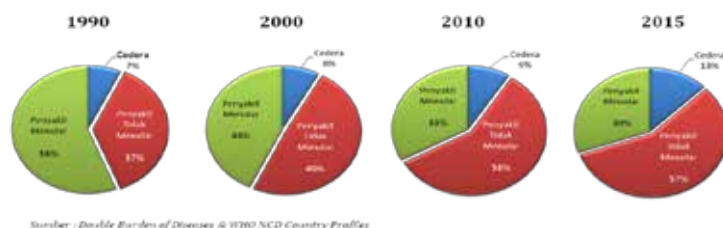
Dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur bahwa penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan terdiri atas pelayanan kesehatan perseorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Selanjutnya dalam Pasal 53 menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan masyarakat ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit suatu kelompok dan masyarakat (promotif dan preventif).

Penggunaan pajak rokok diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dengan mengutamakan promotif dan preventif serta pemberdayaan masyarakat sesuai kebutuhan daerah masing-masing.

Dalam kurun waktu 3 dekade terakhir ini prevalensi penyakit tidak menular terus meningkat.

Gambar.1
Penyebab Utama dari Beban Penyakit di Indonesia,
1990-2015



Berdasarkan gambar.1 diatas, prevalensi penyakit tidak menular terus mengalami peningkatan dari 37% tahun 1990 menjadi 57% tahun 2015. Tren tersebut kemungkinan akan berlanjut seiring dengan

perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (pola makan dengan gizi tidak seimbang, kurang aktifitas fisik, merokok, dan lain-lain).

Penyakit tidak menular juga telah menjadi penyebab utama kematian di Indonesia. Berdasarkan Sistem Registrasi Sampel (SRS) tahun 2014, 5 penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia yaitu:

1. Stroke 21,1%
2. Jantung 12,9%
3. Diabetes 6,7%
4. TBC 5,7%
5. Hipertensi 5,3%

Untuk mengurangi prevalensi penyakit tidak menular, upaya promotif dan preventif harus diutamakan. Selain itu, upaya promotif dan preventif juga untuk menurunkan prevalensi penyakit menular. Namun, dukungan alokasi anggaran di daerah untuk upaya promotif dan preventif masih sangat kurang. Oleh karena itu, penerimaan pajak rokok diarahkan untuk penanggulangan masalah kesehatan dengan pendekatan promotif dan preventif.

Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ini berisi berbagai kegiatan yang merupakan “paket menu komprehensif” yang bersifat *optional*, berdasarkan kebutuhan penanganan permasalahan kesehatan masing-masing daerah.

Pajak rokok ini diharapkan dapat mengisi kekurangan dari program yang ada diluar belanja kesehatan rutin daerah yang difokuskan ke pembiayaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dengan pendekatan promotif dan preventif agar dapat selaras dengan upaya percepatan pembangunan kesehatan 2015-2019.

Penggunaan pajak rokok diperuntukan untuk kegiatan penanganan masalah kesehatan yang belum didanai sumber pembiayaan lain, antara lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, Dana Alokasi Umum (DAU), dana dekonsentrasi, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Sehingga Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lintas sektor di daerah dirasa perlu untuk memilih kegiatan mana yang sudah dan belum didanai oleh sumber dana

tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada duplikasi atau *overlapping* sumber pendanaan untuk suatu kegiatan sebagaimana arahan dari Kementerian Keuangan. Dalam proses penganggaran kegiatan yang akan didanai dari pajak rokok perlu ada sinergi dan keterkaitan antar program atau lintas sektor, serta sinergi antara program nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi/kabupaten/kota.

Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.07/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok, dimana dalam Pasal 31A ayat (2) disebutkan bahwa *“Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat oleh Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan Menteri Kesehatan.”*

B. TUJUAN

Tujuan dari Pedoman Pemanfaatan Pajak Rokok untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat, antara lain:

1. Tujuan Umum

Penggunaan pajak rokok yang tepat guna, tepat sasaran, dan dapat memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat yang optimal

2. Tujuan Khusus

a. Penggunaan pajak rokok dapat meningkatkan dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat.

b. Penggunaan pajak rokok dapat meningkatkan upaya promotif preventif untuk menurunkan:

1) Faktor risiko penyakit tidak menular; dan

2) Faktor risiko penyakit menular termasuk imunisasi.

c. Penggunaan pajak rokok dapat melalui pendekatan promotif

preventif untuk meningkatkan:

- a. Promosi kesehatan;
- b. Kesehatan keluarga;
- c. Gizi;
- d. Kesehatan lingkungan;
- e. Kesehatan kerja dan olah raga;
- f. Pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya; dan
- g. Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

C. SASARAN

Petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat ini digunakan sebagai acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

D. PENGERTIAN

Dalam petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
3. Perilaku Berisiko adalah setiap perilaku atau tindakan yang meningkatkan kemungkinan seseorang tertular atau menularkan penyakit/masalah kesehatan. Dalam konteks pemanfaatan pajak rokok untuk kesehatan ini, perilaku berisiko yang dimaksud

adalah penggunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain (NAPZA), pencegahan tawuran, pencegahan perilaku aman dan tertib dalam berkendara, pengendalian *Human Immuno Deficiency Virus / Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (HIV/AIDS) dan Infeksi Menular Lainnya.

4. Populasi Berperilaku Risiko Tinggi adalah populasi yang mempraktikkan perilaku berisiko tinggi melakukan tawuran, berkendara dengan tidak tertib dan aman, menggunakan NAPZA, terinfeksi HIV/AIDS dan IMS lainnya.
5. *Human Immunodeficiency Virus* selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang menyebabkan *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS).
6. *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah suatu kumpulan gejala berkurangnya kemampuan pertahanan diri yang disebabkan oleh masuknya virus HIV dalam tubuh seseorang.
7. Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lain (NAPZA) adalah bahan/ zat/ obat yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak/ susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan, dan ketergantungan.
8. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
9. Infeksi Menular Seksual (IMS) disebut juga Penyakit Menular Seksual (PMS) atau *Sexually Transmitted Disease* (STDs), *Sexually Transmitted Infection* (STI) or *Venereal Disease* (VD). Pengertian dari IMS ini adalah infeksi yang sebagian besar menular lewat hubungan seksual dengan pasangan yang sudah tertular. IMS disebut juga penyakit kelamin atau penyakit kotor. Namun ini hanya menunjuk pada penyakit yang ada di kelamin.

E. KEGIATAN PENGGUNAAN PAJAK ROKOK

Pemanfaatan pajak rokok difokuskan untuk penguatan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif dan preventif. Untuk melaksanakan kegiatannya menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat, advokasi, kemitraan dan deteksi dini serta upaya preventif lain.

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan, potensi, dan sosial budaya setempat. Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk menciptakan kesadaran, kemauan, serta kemampuan individu, keluarga, dan kelompok masyarakat dalam rangka meningkatkan kepedulian dan peran aktif di berbagai upaya kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan.

2. Advokasi

Advokasi dilakukan kepada para penentu kebijakan dan pemangku kepentingan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, guna mendapatkan dukungan dalam bentuk kebijakan. Selain itu kegiatan advokasi dapat dilakukan untuk pemenuhan sumber daya bidang kesehatan termasuk tenaga, dana, serta sarana dan prasana yang dibutuhkan daerah. Dengan komitmen yang tinggi dari seluruh stakeholder diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan kesehatan masyarakat.

3. Kemitraan

Kemitraan dilaksanakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan advokasi dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatan. Kemitraan dilaksanakan dengan prinsip kesamaan kepentingan, kejelasan tujuan, kesetaraan, kedudukan, dan transparansi di bidang kesehatan. Kemitraan dapat dilakukan dengan berbagai kelompok strategis, antara lain dunia usaha, organisasi profesi, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan organisasi pemuda yang diharapkan dapat memperkuat jejaring bidang kesehatan sehingga permasalahan dan isu-isu kesehatan dapat diatasi.

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)

Peningkatan kapasitas SDM menjadi salah satu strategi yang efektif untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Selain itu peningkatan kualitas tenaga non-kesehatan seperti kader, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dll diharapkan dapat membantu meningkatkan dan menyebarkan informasi kesehatan secara luas kepada masyarakat. Peningkatan kapasitas SDM antara lain dapat berupa pendidikan, pelatihan dan seminar.

5. Pemenuhan Sarana Prasarana Promotif dan Preventif Untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Pelaksanaan pemenuhan sarana dan prasarana promotif dan preventif untuk pelayanan kesehatan masyarakat di masing-masing daerah mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan.

Adapun kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui penggunaan pajak rokok sebagai berikut:

1. Penurunan Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular

Dalam petunjuk teknis ini, penurunan faktor risiko penyakit tidak menular dilakukan melalui penguatan regulasi, jejaring kemitraan faktor risiko penyakit tidak menular, pelayanan preventif penyakit tidak menular dan pengembangan sistem rujukan penyakit tidak menular, deteksi dini penyakit tidak menular dan penatalaksanaan faktor risiko penyakit tidak menular, dan pemenuhan sarana dan prasarana dalam rangka deteksi dini penyakit tidak menular.

Deteksi dini merupakan kegiatan preventif untuk menemukan faktor risiko suatu penyakit sehingga dapat dilakukan intervensi sebelum munculnya gejala penyakit seperti pemeriksaan berat badan dan lingkar perut untuk mendeteksi obesitas, tekanan darah, dan lain-lain. Dalam beberapa penyakit, deteksi dini dilakukan untuk menemukan penyakit pada stadium yang masih awal sehingga dapat dilakukan pengobatan untuk mencegah kondisi lebih parah atau fatal. Sedangkan pencegahan spesifik lain dapat berupa pemberian imunisasi dan lain-lain.

2. Penurunan Faktor Risiko Penyakit Menular Termasuk Imunisasi

Dalam petunjuk teknis ini, penurunan faktor risiko penyakit menular dilakukan melalui pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik, dan imunisasi.

Penyakit menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit. Berdasarkan cara penularannya, penyakit menular dikelompokkan menjadi penyakit menular langsung dan penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit.

Jenis penyakit menular langsung terdiri atas difteri, pertusis, tetanus, polio, campak, typhoid, kolera, rubella, yellow fever, influenza, meningitis, tuberkulosis, hepatitis, penyakit akibat pneumokokus, penyakit akibat rotavirus, penyakit akibat *Human Papiloma Virus* (HPV), penyakit virus ebola, MERS-CoV, infeksi saluran pencernaan, infeksi menular seksual, Infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), infeksi saluran pernafasan, kusta, dan frambusia.

Jenis penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit terdiri atas malaria, demam berdarah, chikungunya, filariasis dan kecacingan, schistosomiasis, japanese encephalitis, rabies, antraks, pes, toxoplasma, leptospirosis, flu burung (*Avian Influenza*), dan *west nile*.

Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular salah satunya dapat dilakukan melalui pemberian kekebalan (imunisasi) yang meliputi imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan imunisasi khusus. Imunisasi dapat dilakukan untuk mencegah penyakit difteri, pertusis, tetanus, polio, campak, typhoid, kolera, rubella, yellow fever, influenza, meningitis, tuberkulosis, hepatitis, penyakit akibat pneumokokus, penyakit akibat rotavirus, dan penyakit akibat *Human Papiloma Virus* (HPV).

3. Peningkatan Promosi Kesehatan

Dalam petunjuk teknis ini, peningkatan promosi kesehatan dilakukan melalui promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat, pembinaan saka bakti husada, dan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan kelompok potensial di masyarakat yang peduli kesehatan.

4. Peningkatan Kesehatan Keluarga

Dalam petunjuk teknis ini, peningkatan kesehatan keluarga dilakukan melalui pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, pelayanan kesehatan balita dan anak pra sekolah, pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja, pelayanan kesehatan usia reproduksi, dan pelayanan kesehatan lanjut usia.

5. Peningkatan Gizi

Kegiatan peningkatan gizi dimaksudkan untuk meningkatkan cakupan, kualitas dan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat dengan prioritas pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), remaja puteri serta usia produktif. Upaya yang dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti:

1. Peningkatan Peran serta masyarakat dalam perbaikan gizi
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)
3. Penguatan kerjasama dan kemitraan dengan lintas program dan lintas sektor, organisasi profesi dan Lembaga swadaya masyarakat dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik

6. Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Dalam petunjuk teknis ini, peningkatan kesehatan lingkungan dilakukan melalui pelayanan kesehatan lingkungan pada desa/kelurahan yang melaksanakan STBM, pelayanan kesehatan lingkungan pada sarana air minum yang dilakukan pengawasan, pelayanan kesehatan lingkungan pada tempat-tempat umum, pelayanan kesehatan lingkungan pada tempat pengelolaan makanan, pelayanan kesehatan lingkungan pada rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis, dan pelayanan kesehatan lingkungan pada kabupaten/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat.

Peningkatan kesehatan lingkungan dimaksudkan sebagai penguatan upaya kesehatan lingkungan yang meliputi penyehatan, pengamanan, dan pengendalian. Penyehatan dilakukan terhadap media lingkungan berupa air, udara, tanah,

pangan, serta sarana dan bangunan. Pengamanan dilakukan melalui upaya perlindungan kesehatan masyarakat, proses pengolahan limbah, dan pengawasan terhadap limbah. Pengendalian dilakukan terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit.

Peningkatan kesehatan lingkungan tersebut di atas dilakuakn dalam rangka pemenuhan memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan.

7. Peningkatan Kesehatan Kerja dan Olah Raga

Dalam petunjuk teknis ini, peningkatan kesehatan lingkungan dilakukan melalui pelayanan kesehatan kerja nelayan, pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor informal, pelayanan kesehatan bagi pekerja perempuan melalui Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP), upaya pengendalian dampak kesehatan akibat pajanan merkuri pada masyarakat sekitar penambang emas skala kecil, pelayanan kesehatan kerja, dan upaya pengendalian bahaya penggunaan pestisida pada petani.

8. Peningkatan Pengendalian Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau Lainnya

Dalam petunjuk teknis ini, peningkatan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya dilakukan melalui upaya promotif dan preventif dalam pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau, dan penetapan kawasan tanpa rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum.

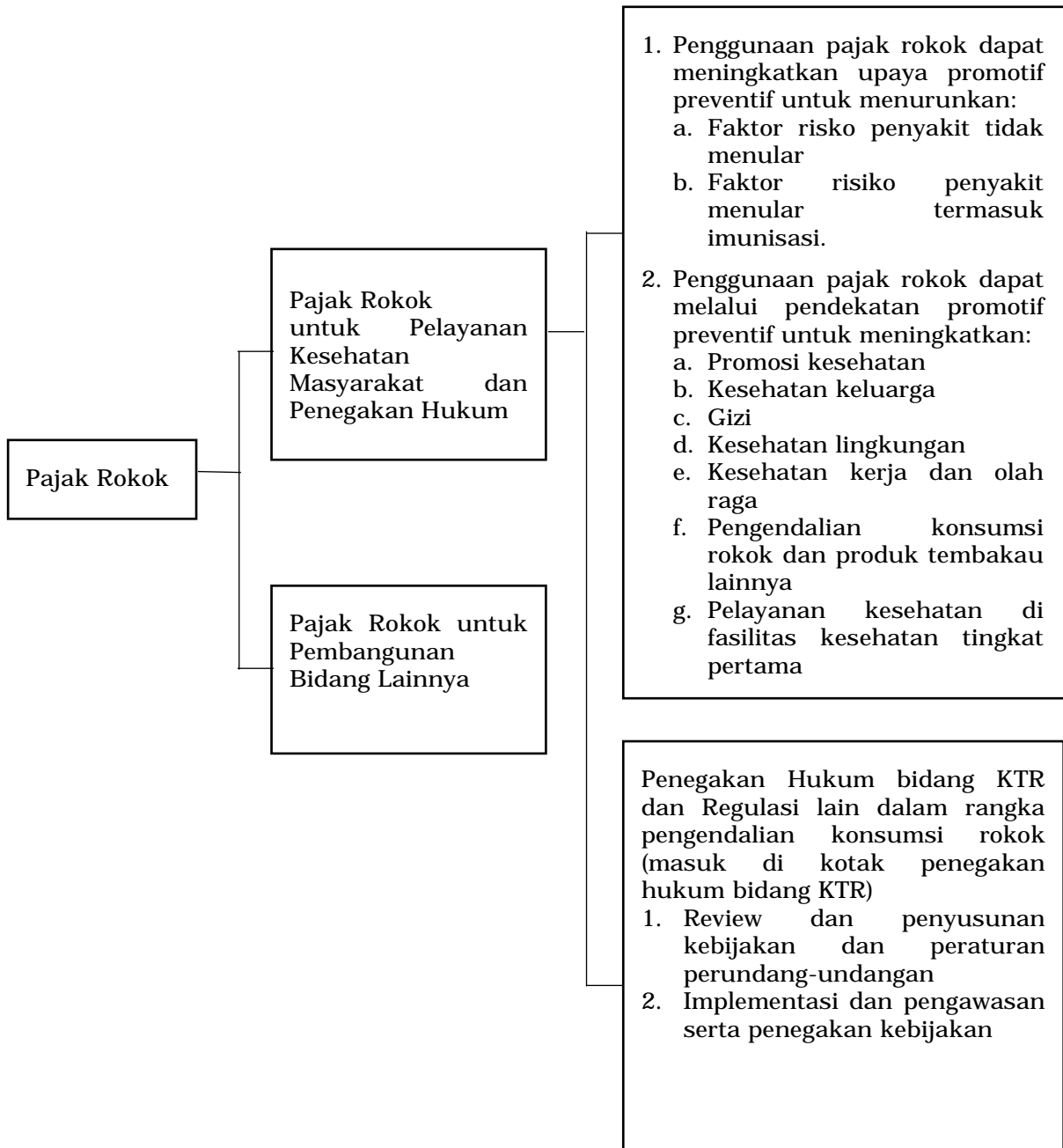
9. Pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Dalam petunjuk teknis ini, Pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dilakukan melalui peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan akses pelayanan kesehatan.

Selain digunakan untuk kegiatan di atas, pajak rokok dapat digunakan untuk peningkatan pembangunan dan pemeliharaan gedung puskesmas. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan gedung puskesmas digunakan dalam rangka pemenuhan standar puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar. 2

Skema Penggunaan Pajak Rokok untuk Bidang Kesehatan



Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat yang dapat dilaksanakan melalui penggunaan pajak rokok secara lebih rinci dapat dilihat pada matriks berikut:

UPAYA PROMOTIF PREVENTIF UNTUK MENURUNKAN FAKTOR RISIKO PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
1	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian PTM	1 Penguatan Regulasi	A Advokasi		Pemangku kebijakan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota	
			1	Rekapitulasi data kesehatan PTM		
			2	Pelaksanaan surveilans faktor risiko PTM di masyarakat maupun FKTP		
			3	Analisis situasi dan perencanaan kegiatan PTM		
			4	Monitoring dan evaluasi faktor risiko PTM, penyakit tidak menular		
			5	Penelitian terkait faktor risiko PTM (prevalensi faktor risiko maupun penyakit, validasi penatalaksanaan penyakit di FKTP)		
			6	Penyusunan kebijakan faktor risiko PTM dan yang mendukung upaya PPTM di masing-masing daerah (yang sudah ada dan yang belum ada) Contoh: regulasi KTR dan regulasi gula, garam dan lemak.		
			7	Penegakan regulasi faktor risiko PTM		
		8	Melaksanakan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pengendalian faktor risiko dan penyakit tidak menular			
			2 Jejaring kemitraan faktor risiko PTM	A Kemitraan	1	Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota di masing-masing daerah

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
			2	Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan PPTM	aliansi bupati dan walikota, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/ swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah	institusi terkait	
			3	Rapat koordinasi			
		3					
		Pelayanan preventif penyakit tidak menular dan pengembangan sistem	A	Pemberdayaan Masyarakat			
			1	Pemberdayaan perorangan (guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, anak sekolah, dan lain-lain) mengenai pengetahuan PPTM	Tenaga non kesehatan dan kesehatan (bidan, dokter	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Posbindu PTM,	
			2	Pemberdayaan kelompok masyarakat			

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan																
		rujukan PTM	<table border="1"> <tr> <td>3</td> <td>Pemberdayaan masyarakat umum</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Optimalisasi kegiatan berbasis Posbindu (UKBM) dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya peningkatan PPTM</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Optimalisasi kegiatan berbasis Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dalam upaya pencegahan faktor risiko PTM dan PTM</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Optimalisasi kegiatan kepemudaan sebagai bentuk pemberdayaan partisipasi generasi muda</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan kelompok oleh kader-kader kesehatan</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mengadakan sosialisasi/ lokakarya dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk PPTM</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Memberikan KIE tentang pengendalian faktor risiko dan pengendalian penyakit tidak menular</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Gerakan memasyarakatkan upaya pencegahan dan pengendalian PTM (CERDIK, PANDU: pelayanan terpadu PTM, GERAKAN BERHENTI MEROKOK, PERMADI: PERIKSA MATA SENDIRI)</td> </tr> </table>	3	Pemberdayaan masyarakat umum	-	Optimalisasi kegiatan berbasis Posbindu (UKBM) dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya peningkatan PPTM	-	Optimalisasi kegiatan berbasis Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dalam upaya pencegahan faktor risiko PTM dan PTM	-	Optimalisasi kegiatan kepemudaan sebagai bentuk pemberdayaan partisipasi generasi muda	-	Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan kelompok oleh kader-kader kesehatan	4	Mengadakan sosialisasi/ lokakarya dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk PPTM	5	Memberikan KIE tentang pengendalian faktor risiko dan pengendalian penyakit tidak menular	6	Gerakan memasyarakatkan upaya pencegahan dan pengendalian PTM (CERDIK, PANDU: pelayanan terpadu PTM, GERAKAN BERHENTI MEROKOK, PERMADI: PERIKSA MATA SENDIRI)	umum) di FKTP, kader, kelompok kerja, jejaring, tenaga medis, tenaga non-kesehatan, dan perawat terlatih	Pondok Bersalin Desa (Polindes), rumah, kelas ibu, rumah tunggu, Posbindu, Puskesmas, rumah sehat desa, dan institusi terkait	
3	Pemberdayaan masyarakat umum																					
-	Optimalisasi kegiatan berbasis Posbindu (UKBM) dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya peningkatan PPTM																					
-	Optimalisasi kegiatan berbasis Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dalam upaya pencegahan faktor risiko PTM dan PTM																					
-	Optimalisasi kegiatan kepemudaan sebagai bentuk pemberdayaan partisipasi generasi muda																					
-	Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan kelompok oleh kader-kader kesehatan																					
4	Mengadakan sosialisasi/ lokakarya dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk PPTM																					
5	Memberikan KIE tentang pengendalian faktor risiko dan pengendalian penyakit tidak menular																					
6	Gerakan memasyarakatkan upaya pencegahan dan pengendalian PTM (CERDIK, PANDU: pelayanan terpadu PTM, GERAKAN BERHENTI MEROKOK, PERMADI: PERIKSA MATA SENDIRI)																					
			B Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)																			
			1	<i>Capacity building</i> pengendalian faktor risiko PTM	Kader, kelompok kerja, jejaring,	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu),																
			2	<i>Capacity building</i> deteksi dini dan penemuan dini PTM																		
			3	<i>Capacity building</i> tatalaksana dini PTM																		

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			4	<i>Capacity building</i> paliatif di komunitas	tenaga medis, tenaga non-kesehatan, dan perawat terlatih	Posbindu PTM, Pondok Bersalin Desa (Polindes), rumah, kelas ibu, rumah tunggu, Posbindu, Puskesmas, rumah sehat desa, dan institusi terkait
			5	<i>Capacity building</i> surveilans faktor risiko PTM bagi kader, kelompok kerja, atau jejaring PTM di masing- masing daerah		
			6	Pelatihan penanggulangan gangguan fungsional bagi kader		
				Pelatihan penanggulangan gangguan indera bagi kader		
			7	<i>Capacity building</i> kader posbindu PTM		
			8	Operasional pengumpulan data dan pelaksanaan monitoring faktor risiko PTM melalui posbindu		
			9	Pelatihan komunikasi bagi petugas penyuluh, tenaga kesehatan, dan tenaga non-kesehatan mengenai faktor risiko dan PPTM		
			C Sarana Prasarana Promotif Preventif			
			1	Penambahan fasilitas dan alat kesehatan dalam taman kota, taman bermain anak, alun-alun	Tenaga non kesehatan dan kesehatan (bidan,	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Posbindu

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
				2 Pembuatan layanan iklan masyarakat PPTM	dokter umum) di FKTP, kader, kelompok kerja, jejaring, tenaga medis, tenaga non-kesehatan, dan perawat terlatih	PTM, Pondok Bersalin Desa (Polindes), rumah, kelas ibu, rumah tunggu, Posbindu, Puskesmas, rumah sehat desa, dan institusi terkait	
		4 Deteksi dini PTM dan penatalaksanaan faktor risiko PTM (merokok,	A	Pemberdayaan Masyarakat			
			1	Pelaksanaan deteksi dini PTM di FKTP dan FKRTL	Kader, kelompok kerja, jejaring, tenaga	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Posbindu	
			2	Pelaksanaan deteksi dini di Posbindu PTM di masyarakat			

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
		obesitas, hipertensi, dan hiperlipidemia)	3 Pelaksanaan deteksi dini di Posbindu di institusi pemerintah dan tatanan lain (sekolah, perkantoran, pabrik, tempat-tempat ibadah dan lain-lain)	medis, tenaga non-kesehatan, dan perawat terlatih	PTM, Pondok Bersalin Desa (Polindes), rumah, kelas ibu, rumah tunggu, Posbindu, Puskesmas, dan rumah sehat desa		
			B Sarana Prasarana Promotif Preventif				
			1 Pemenuhan obat-obatan esensial PTM	Kader, kelompok kerja,	Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu),		
			2 Bantuan transportasi rujukan PTM bagi masyarakat tidak mampu	jejaring, tenaga medis, tenaga non-kesehatan, dan perawat terlatih	Posbindu PTM, Pondok Bersalin Desa (Polindes), rumah, kelas ibu,		

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
						rumah tunggu, Posbindu, Puskesmas, dan rumah sehat desa	
		5 Sarana dan Prasarana	A	Sarana Prasarana Promotif Preventif			
				1 Alat deteksi dini faktor risiko PPKD	Provinsi, kabupaten/kota, institusi terkait	FKTP di perkotaan/pedesaan secara bertahap sesuai dengan program prioritas/ke siapan daerah	
				- Faktor risiko merokok: skrining dan konseling upaya berhenti merokok anak sekolah dan kelompok khusus			
				- Faktor risiko penyakit paru obstruksi kronik			
				- Faktor risiko asma			
				- Faktor risiko SLE			
				- Faktor risiko osteoporosis			
				- Faktor risiko thalasemia			
				- Faktor risiko penyakit ginjal kronik			

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			2	Alat deteksi dini faktor risiko PJPD		
			-	Pemeriksaan tekanan darah		
			-	Deteksi dini komplikasi tekanan darah tinggi		
			-	Deteksi dini serangan stroke & serangan jantung		
			-	Kegawatdaruratan stroke dan serangan jantung		
			3	Alat deteksi dini faktor risiko Kanker		
			-	Deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim untuk WUS usia 30 - 50 tahun		
			-	Deteksi dini kanker anak		
			-	Alat tindak lanjut dini kanker (krioterapi/alat tindak lanjut IVA)		
			4	Alat deteksi dini faktor risiko DM-PM		
			-	Pemeriksaan gula darah		
			-	Pemeriksaan obesitas		
			5	Alat deteksi dini Gangguan Pendengaran pada Bayi baru lahir		
			-	Otoacoustic Emissions (OAEs)		

**UPAYA PROMOTIF PREVENTIF UNTUK MENURUNKAN FAKTOR RISIKO PENYAKIT MENULAR
TERMASUK IMUNISASI**

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
1	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung	1 Pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid	A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pemberdayaan kelompok masyarakat (guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain) mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid 2 Pemberdayaan kader Posyandu dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Menular HIV/AIDS, Hepatitis, Diare, Tifoid, TB, Pneumonia, Kusta/Frambusia Menular Hepatitis, Diare dan Tifoid 3 Peningkatan kapasitas petugas dalam Surveilans Epidemiologi Pengendalian penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid 4 Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran Pencegahan dan Pengendalian penyakit Hepatitis, Diare, Tifoid	Guru, Masyarakat /Toma, Tokoh agama Kader Petugas Puskesmas, Petugas Kab/Kota Kader	Puskesmas Posyandu, Puskesmas Dinkes Kab/kota, Dinkes Provinsi Puskesmas	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			5	Mengadakan sosialisasi/ lokakarya dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk pencegahan dan pengendalian penyakit Menular Hepatitis, Diare dan Tifoid	Wartawan, LSM, Ormas, organisasi profesi, Institusi Pendidikan	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota	
			6	Melaksanakan Deteksi dini Penyakit Menular Hepatitis, Diare dan Tifoid (Transport Lokal pengumpulan sampel, Rujukan sampel)	Masyarakat, kelompok berisiko, Ibu hamil, bayi, balita, tenaga kesehatan berisiko	Puskesmas, lokalisasi, Lapas, lokasi kel.Berisiko, Pustu, Poskesdes	
			7	Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Rumah, Lokalisasi, Lapas, dan lain-lain untuk: mengumpulkan data sentinel/surveilans Hepatitis, Surveilans/SKD KLB Diare, pengumpulan data surveilans Tifoid	Bayi, Ibu hamil, penasun, LSL, dan lain-lain	Rumah tangga, Lokalisasi, Lapas,	
			B Advokasi				
			1	Rekapitulasi data kesehatan penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid	Penderita, Masyarakat, kelompok berisiko,	Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
				remaja, ibu hamil, anak	Kab/Kota	
			2 Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid	Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Kab/Kota	Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	
			3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid	Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Kab/Kota	Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	
			4 Penyediaan alat dan bahan pengolah data untuk pencatatan dan pelaporan Pencegahan dan Pengendalian penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid	Petugas Kesehatan Puskesmas /Pustu, Dinkes Kab/kota	Pustu,Pusk esmas, Dinkes Kab/Kota	
			5 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid	Petugas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			6	Melaksanakan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid	Pemda, Pengambil Keputusan	Dinkes Kab/Kota; Dinkes Provinsi	
			7	Penyusunan Regulasi untuk mendukung kebijakan pengendalian penyakit Hepatitis, Diare, dan Tifoid	Petugas Dinkes Kab/Kota, DPR	Dinkes Kab/Kota; Dinkes Provinsi	
			C	Kemitraan			
			1	Rapat koordinasi kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan LSM, Ormas, TOMA, Tokoh agama, dan lain-lain di masing-masing daerah Hepatitis, Diare dan Tifoid	Petugas Kes Dinkes Kab/Kota	Dinkes Kab/Kota	
			2	Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit	LSM, Organisasi Masyarakat	Dinkes Kab/Kota	
			3	Pertemuan dengan Dunia Usaha untuk memanfaatkan CSR Perusahaan untuk pencegahan Pengendalian Hepatitis, Diare dan Tifoid			
			D	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)			
			1	Peningkatan kapasitas bagi petugas konseling tenaga kesehatan mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid	Petugas Puskesmas /Pustu/ poskesdes,	Dinkes Kab/Kota, Puskesmas	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
				Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi		
			2 Peningkatan kapasitas petugas deteksi dini penyakit menular Hepatitis, Diare dan Tifoid	Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	Dinkes Kab/Kota; Dinkes Provinsi	
			3 Peningkatan kapasitas petugas Puskesmas dalam tatalaksana penyakit menular Diare dan Tifoid	Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	Dinkes Kab/Kota; Dinkes Provinsi	
			4 Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran Pencegahan dan Pengendalian penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid	Kader Kesehatan	Puskesmas	
			5 Melaksanakan sosialisasi bagi petugas kesehatan tentang Pencegahan dan Deteksi dini penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid	Petugas Dinkes Kab/Kota, Petugas Puskesmas	Dinkes Kab/Kota; Dinkes Provinsi, Puskesmas	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			E Sarana Prasarana Promotif Preventif			
			1 Penyediaan logistik (alat dan bahan) penyakit menular antara lain untuk Diare perlu LROA Kit (gelas, sendok, teko/ceret dalam rangka aktivasi layanan rehidrasi oral di fasyankes), dan untuk Hepatitis perlu Deteksi dini (Reagen Rapid test Hepatitis B dan C, dan bahan habis pakainya)	Ibu hamil, bayi, balita, Remaja, anak sekolah, kelompok berisiko, tenaga kesehatan berisiko	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			2 Distribusi Logistik Hepatitis, Diare dan Tifoid ke Fasilitas Kesehatan	Petugas Dinkes Kab Kota	Dinkes Kab/Kota,	
			3 Penyusunan dan Penggandaan Buku Pedoman dan Media KIE dalam Pencegahan dan Pengendalian penyakit Hepatitis, Diare dan Tifoid	Masyarakat dan petugas kesehatan	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			4 Melaksanakan Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dan elektronik tentang pencegahan dan deteksi dini penyakit Menular Hepatitis, Diare dan Tifoid	TV Nasional, TV Lokal, Radio, Koran, Majalah, Leaflet, Poster,	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
				Media KIE lainnya		
			5 Pelaksanaan Vaksinasi Hepatitis B bagi tenaga kesehatan berisiko sebagai tindak lanjut deteksi dini Hepatitis, Diare dan Tifoid	dokter, bidan, analis,	Puskesmas, Rumah sakit	
		2 Pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS dan PIMS	A Pemberdayaan Masyarakat			
			1 Pemberdayaan kelompok masyarakat (guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain) mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS	Guru, Masyarakat /Toma, Tokoh agama	Puskesmas	
			2 Pemberdayaan kader Posyandu dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Menular HIV/AIDS dan PIMS	Kader	Posyandu, Puskesmas	
			3 Peningkatan kapasitas petugas dalam Surveilans Epidemiologi Pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS	Petugas Puskesmas, Petugas Kab/Kota	Dinkes Kab/kota; Dinkes Provinsi	
			4 Melaksanakan Deteksi dini Penyakit Menular HIV/AIDS dan PIMS	Masyarakat, kelompok Berisiko, Ibu hamil, bayi, balita, Tenaga kesehatan	Puskesmas, lokalisasi, Lapas, lokasi kel.Berisiko, Pustu, Poskesdes	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
				Berisiko		
			5 Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Rumah atau Lokalisasi, Lapas, dan lain-lain untuk mengumpulkan data sasaran, data surveilans pada kelompok berisiko deteksi dini dan sentinel penyakit HIV/AIDS dan PIMS	Bayi, Ibu hamil, penasun, LSL, dan lain-lain	Rumah tangga, Lokalisasi, Lapas,	
			6 Mengadakan sosialisasi/lokakarya dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk pencegahan dan pengendalian penyakit Menular HIV/AIDS dan PIMS	Wartawan, LSM, Ormas, Organisasi profesi, Institusi Pendidikan	Dinkes Provinsi, dinkes Kab/Kota	
			B Advokasi			
			1 Rekapitulasi data kesehatan penyakit HIV/AIDS dan PIMS	Penderita, Masyarakat, kelompok berisiko, remaja, ibu hamil, anak	Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	
			2 Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit HIV/AIDS dan PIMS	Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes	Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
				Kab/Kota		
			3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS	Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Kab/Kota	Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes kab/Kota	
			4 Penyediaan alat dan bahan pengolah data untuk pencatatan dan pelaporan Pencegahan dan Pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS	Petugas Kesehatan Puskesmas /Pustu, Dinkes Kab/kota	Pustu, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	
			5 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS	Petugas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			6 Melaksanakan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS	Pemda, Pengambil Keputusan	Dinkes Kab/Kota; Dinkes Provinsi	
			7 Penyusunan Regulasi untuk mendukung kebijakan pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS	Petugas Dinkes Kab/Kota, DPR	Dinkes Kab/Kota; Dinkes Provinsi	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			C Kemitraan			
			1 Rapat koordinasi kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan LSM, Ormas, Toma, Tokoh agama, dan lain-lain di masing-masing daerah HIV/AIDS dan PIMS	Petugas Kes Dinkes Kab/Kota	Dinkes Kab/Kota	
			2 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS	LSM, Organisasi Masyarakat,	Dinkes Kab/Kota	
			3 Pertemuan dengan Dunia Usaha untuk memanfaatkan CSR Perusahaan HIV/AIDS dan PIMS			
			D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)			
			1 Peningkatan kapasitas bagi petugas konseling tenaga kesehatan mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS	Petugas Puskesmas /Pustu/ Poskesdes, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	Dinkes Kab/Kota, Puskesmas	
			2 Peningkatan kapasitas pengelola program pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dan PIMS	Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			3	Peningkatan kapasitas petugas RR, surveilans, monev, dan farmasi dalam pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dan PIMS	Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			4	Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran Pencegahan dan Pengendalian penyakit HIV/AIDS dan Sifilis	Kader Kesehatan	Puskesmas	
			5	Peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dan PIMS	Petugas Dinkes Kab/Kota, Petugas Puskesmas	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Puskesmas	
			E Sarana Prasarana Promotif Preventif				
			1	Penyediaan logistik (alat dan bahan) deteksi dini penyakit menular HIV/AIDS dan PIMS	Ibu hamil, bayi, balita, Remaja, anak sekolah, kelompok berisiko, tenaga kesehatan berisiko	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan		
			2	Distribusi Logistik ke Fasilitas Kesehatan HIV/AIDS dan PIMS	Petugas Dinkes Kab Kota	Dinkes Kab/Kota,		
			3	Melaksanakan Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dan elektronik tentang pencegahan dan deteksi dini penyakit Menular HIV/AIDS dan PIMS	TV Nasional, TV Lokal, Radio, Koran, Majalah, Leaflet, Poster, Media KIE lainnya	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi		
			4	Penyusunan dan Penggandaan Buku Pedoman dan Media KIE dalam Pencegahan dan Pengendalian penyakit HIV/AIDS dan PIMS	Masyarakat dan petugas kesehatan	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi		
			5	Pelaksanaan Vaksinasi Hepatitis B bagi tenaga kesehatan berisiko sebagai tindak lanjut deteksi HIV/AIDS dan PIMS	dokter, bidan, analis,	Puskesmas, Rumah sakit		
		3	A Pemberdayaan Masyarakat					
		Pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit TB	1	Pemberdayaan kelompok masyarakat (guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain) mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit TB	Guru, Masyarakat /Toma, Tokoh agama	Puskesmas		

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			2 Pemberdayaan kader Posyandu dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Menular HIV/AIDS, Hepatitis, Diare, Tifoid, TB, Pneumonia, Kusta/Frambusia Menular HIV/AIDS, Hepatitis, Diare, Tifoid, TB, Pneumonia, Kusta/Frambusia	Kader	Posyandu, Puskesmas	
			3 Peningkatan kapasitas petugas dalam Surveilans Epidemiologi Pengendalian penyakit TB	Petugas Puskesmas, Petugas Kab/Kota	Dinkes Kab/kota, Dinkes Provinsi	
			4 Melaksanakan Deteksi dini Penyakit Menular TB	Masyarakat, kelompok Berisiko, Ibu hamil, bayi, balita, Tenaga kesehatan Berisiko	Puskesmas, Lokalisasi, Lapas, Lokasi Kelompok Berisiko, Pustu, Poskesdes	
			5 Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Rumah, atau Lokalisasi, Lapas, dan lain-lain untuk mengumpulkan data sasaran, data surveilans pada kelompok berisiko deteksi dini dan sentinel penyakit TB	Bayi, Ibu hamil, penasun, LSL, dan lain-lain	Rumah tangga, Lokalisasi, Lapas,	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			6 Mengadakan sosialisasi/ loka karya dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk pencegahan dan pengendalian penyakit Menular TB	Wartawan, LSM, Ormas, Organisasi profesi, Institusi Pendidikan	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota	
			B Advokasi			
			1 Rekapitulasi data kesehatan penyakit TB	Penderita, Masyarakat, kelompok berisiko, remaja, ibu hamil, anak	Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	
			2 Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit TB	Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Kab/Kota	Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes kab/Kota	
			3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit TB	Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Kab/Kota	Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes kab/Kota	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			4	Penyediaan alat dan bahan pengolah data untuk pencatatan dan pelaporan Pencegahan dan Pengendalian penyakit TB	Petugas Kesehatan Puskesmas /Pustu, Dinkes Kab/kota	Pustu, Puskesmas, Dinkes kab/Kota	
			5	Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TB	Petugas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			6	Melaksanakan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TB	Pemda, Pengambil Keputusan	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			7	Penyusunan Regulasi untuk mendukung kebijakan pengendalian penyakit TB	Petugas Dinkes Kab/Kota, DPR	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			C	Kemitraan			
			1	Rapat koordinasi kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan LSM, Ormas, Toma, Tokoh agama, dan lain-lain di masing-masing daerah TB	Petugas Kes Dinkes Kab/Kota	Dinkes Kab/Kota	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			2	Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TB	LSM, Organisasi Masyarakat,	Dinkes Kab/Kota	
			3	Pertemuan dengan Dunia Usaha untuk memanfaatkan CSR Perusahaan TB			
			D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)				
			1	Peningkatan kapasitas bagi petugas konseling tenaga kesehatan mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit TB	Petugas Puskesmas / Pustu/ poskesdes, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	Dinkes Kab/Kota, Puskesmas	
			2	Peningkatan kapasitas petugas deteksi dini penyakit menular TB	Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			3	Peningkatan kapasitas petugas tatalaksana penyakit menular TB	Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			4	Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran Pencegahan dan Pengendalian penyakit TB	Kader Kesehatan	Puskesmas	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			5 Melaksanakan sosialisasi bagi petugas kesehatan tentang Pencegahan dan Deteksi dini penyakit TB	Petugas Dinkes Kab/Kota, Petugas Puskesmas	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Puskesmas		
			E Sarana Prasarana Promotif Preventif				
			1 Penyediaan logistik (alat dan bahan) deteksi dini penyakit menular TB	Ibu hamil, bayi, balita, Remaja, anak sekolah, kel. Berisiko, tenaga kesehatan berisiko	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi		
			2 Distribusi Logistik ke Fasilitas Kesehatan TB	Petugas Dinkes Kab Kota	Dinkes Kab/Kota,		
			3 Melaksanakan Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dan elektronik tentang pencegahan dan deteksi dini penyakit Menular TB	TV Nasional, TV Lokal, Radio, Koran, Majalah, Leaflet,	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi		

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
				Poster, Media KIE lainnya		
			4 Penyusunan dan Penggandaan Buku Pedoman dan Media KIE dalam Pencegahan dan Pengendalian penyakit TB	Masyarakat dan petugas kesehatan	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			5 Pelaksanaan Vaksinasi Hepatitis B bagi tenaga kesehatan berisiko sebagai tindak lanjut deteksi dini TB	dokter, bidan, analis	Puskesmas, Rumah sakit	
		4 Pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit ISPA /Pneumonia	A Pemberdayaan Masyarakat			
			1 Pemberdayaan kelompok masyarakat (guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain) mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia	Guru, Masyarakat /Toma, Tokoh agama	Puskesmas	
			2 Pemberdayaan kader Posyandu dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Menular ISPA/Pneumonia	Kader	Posyandu, Puskesmas	
			3 Pemberdayaan masyarakat dalam penemuan kasus ISPA/pneumonia dan pelaporannya	Kader, Toma, Toga	Posyandu, Puskesmas	
			4 Mengadakan sosialisasi/lokakarya dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah	Wartawan, LSM, Ormas, Organisasi	Dinkes Provinsi, dinkes Kab/Kota	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
				dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk pencegahan dan pengendalian penyakit menular ISPA/Pneumonia	profesi, Institusi Pendidikan		
			5	Melaksanakan Deteksi dini Penyakit Menular ISPA/Pneumonia	Masyarakat, kelompok Berisiko, Ibu hamil, bayi, balita, Tenaga kesehatan Berisiko	Puskesmas, Lokalisasi, Lapas, Lokasi Kelompok Berisiko, Pustu, Poskesdes	
			6	Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Rumah atau Lokalisasi, Lapas, dan lain-lain untuk mengumpulkan data sasaran, data surveilans pada kelompok berisiko deteksi dini dan sentinel penyakit ISPA/Pneumonia	Bayi, Ibu hamil, penasun, LSL, dan lain-lain	Rumah tangga, Lokalisasi, Lapas,	
			B Advokasi				
			1	Rekapitulasi data kesehatan penyakit ISPA/Pneumonia	Penderita, Masyarakat, kelompok berisiko, remaja, ibu hamil, anak	Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			2 Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit ISPA/Pneumonia	Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Kab/Kota	Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	
			3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia	Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Kab/Kota	Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	
			4 Penyediaan alat dan bahan pengolah data untuk pencatatan dan pelaporan Pencegahan dan Pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia	Petugas Kesehatan Puskesmas /Pustu, Dinkes Kab/kota	Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	
			5 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia	Petugas Dinkes Kab/Kota; Dinkes Provinsi	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			6 Melaksanakan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia	Pemda, Pengambil Keputusan	Dinkes Kab/Kota, Dinkes	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
					Provinsi		
			7 Penyusunan Regulasi untuk mendukung kebijakan pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia	Petugas Dinkes Kab/Kota, DPR	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi		
			C Kemitraan				
			1 Rapat koordinasi kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan LSM, Ormas, Tokoh agama, dan lain-lain di masing-masing daerah ISPA/Pneumonia	Petugas Kes Dinkes Kab/Kota	Dinkes Kab/Kota		
			2 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia	LSM, Organisasi Masyarakat	Dinkes Kab/Kota		
			3 Pertemuan dengan dunia usaha untuk memanfaatkan CSR Perusahaan ISPA/Pneumonia				
			D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)				
			1 Peningkatan kapasitas bagi petugas konseling tenaga kesehatan mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia	Petugas Puskesmas /Pustu/ Poskesdes, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	Dinkes Kab/Kota, Puskesmas		

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			2	Peningkatan kapasitas petugas dalam Surveilans Epidemiologi Pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia	Petugas Puskesmas, Petugas Kab/Kota	Dinkes Kab/kota, Dinkes Provinsi	
			3	Peningkatan kapasitas petugas deteksi dini penyakit menular ISPA/Pneumonia	Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			4	Peningkatan kapasitas petugas tata laksana penyakit menular ISPA/Pneumonia	Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			5	Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran Pencegahan dan Pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia	Kader Kesehatan	Puskesmas	
			6	Melaksanakan sosialisasi bagi petugas kesehatan tentang Pencegahan dan Deteksi dini penyakit ISPA/Pneumonia	Petugas Dinkes Kab/Kota, Petugas Puskesmas	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Puskesmas	
			E Sarana Prasarana Promotif Preventif				
			1	Penyediaan logistik (alat dan bahan) deteksi dini penyakit menular ISPA/Pneumonia	Ibu hamil, bayi, balita, Remaja, anak	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
				sekolah, kel. Berisiko, tenaga kesehatan berisiko		
			2 Distribusi Logistik ke Fasilitas Kesehatan ISPA/Pneumonia	Petugas Dinkes Kab Kota	Dinkes Kab/Kota,	
			3 Melaksanakan Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dan elektronik tentang pencegahan dan deteksi dini penyakit Menular HIV/AIDS, Hepatitis, Diare, Tifoid, TB, Pneumonia, Kusta/Frambusia ISPA/Pneumonia	TV Nasional, TV Lokal, Radio, Koran, Majalah, Leaflet, Poster, Media KIE lainnya	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			4 Penyusunan dan Penggandaan Buku Pedoman dan Media KIE dalam Pencegahan dan Pengendalian penyakit ISPA/Pneumonia	Masyarakat dan petugas kesehatan	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			5 Pelaksanaan Vaksinasi Hepatitis B bagi Tenaga kesehatan berisiko sebagai tindak lanjut deteksi dini ISPA/Pneumonia	Dokter, bidan, analis	Puskesmas, Rumah sakit	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
		5 Pelayanan pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia	A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pemberdayaan kelompok masyarakat (guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain) mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia 2 Pemberdayaan kader Posyandu dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Menular Kusta dan Frambusia 3 Peningkatan kapasitas petugas dalam Surveilans Epidemiologi Pengendalian penyakit 4 Mengadakan sosialisasi/ loka karya dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk pencegahan dan pengendalian penyakit Menular Kusta dan Frambusia 5 Melaksanakan Deteksi dini Penyakit Menular Kusta dan Frambusia	Guru, Masyarakat /Toma, Tokoh agama Kader Petugas Puskesmas, Petugas Kab/Kota Wartawan, LSM, Ormas, Organisasi profesi, Institusi Pendidikan Masyarakat, kelompok Berisiko, Ibu hamil,	Puskesmas Posyandu, Puskesmas Dinkes Kab/kota, Dinkes Provinsi Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Lokalisasi, Lapas, Lokasi	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
				bayi, balita, Tenaga kesehatan Berisiko	Kelompok Berisiko, Pustu, Poskesdes	
			6 Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Rumah, atau Lokalisasi, Lapas, dan lain-lain untuk mengumpulkan data sasaran, data surveilans pada kelompok berisiko deteksi dini dan sentinel penyakit Kusta dan Frambusia	Bayi, Ibu hamil, penasun, LSL, dan lain-lain	Rumah tangga, Lokalisasi, Lapas,	
			B Advokasi			
			1 Rekapitulasi data kesehatan penyakit Kusta dan Frambusia	Penderita, Masyarakat, kelompok berisiko, remaja, ibu hamil, anak	Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	
			2 Pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit kusta dan Frambusia	Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Kab/Kota	Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	
			3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia	Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu,	Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
				Dinkes Kab/Kota	Kab/Kota	
			4 Penyediaan alat dan bahan pengolah data untuk pencatatan dan pelaporan Pencegahan dan Pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia	Petugas Kesehatan Puskesmas /Pustu, Dinkes Kab/kota	Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	
			5 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia	Petugas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			6 Melaksanakan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia	Pemda, Pengambil Keputusan	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			7 Penyusunan Regulasi untuk mendukung kebijakan pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia	Petugas Dinkes Kab/Kota, DPR	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			C Kemitraan			
			1 Rapat koordinasi kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan LSM, Ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain di masing-masing daerah Kusta dan	Petugas Kes Dinkes Kab/Kota	Dinkes Kab/Kota	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			Frambusia				
			2 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia	LSM, Organisasi Masyarakat,	Dinkes Kab/Kota		
			3 Pertemuan dengan Dunia Usaha untuk memanfaatkan CSR Perusahaan untuk pencegahan Kusta dan Frambusia				
			D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)				
			1 Peningkatan kapasitas bagi petugas Konseling tenaga kesehatan mengenai pencegahan dan pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia	Petugas Puskesmas /Pustu/ poskesdes, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	Dinkes Kab/Kota, Puskesmas		
			2 Peningkatan kapasitas petugas deteksi dini penyakit menular Kusta dan Frambusia	Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi		
			3 Peningkatan kapasitas petugas tatalaksana penyakit menular Kusta dan Frambusia	Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi		

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			4	Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran Pencegahan dan Pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia	Kader Kesehatan	Puskesmas	
			5	Melaksanakan sosialisasi bagi petugas kesehatan tentang Pencegahan dan Deteksi dini penyakit Kusta dan Frambusia	Petugas Dinkes Kab/Kota, Petugas Puskesmas	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Puskesmas	
			E Sarana Prasarana Promotif Preventif				
			1	Penyediaan logistik (alat dan bahan) deteksi dini penyakit menular Kusta dan Frambusia	Ibu hamil, bayi, balita, Remaja, anak sekolah, kel. Berisiko, tenaga kesehatan berisiko	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			2	Distribusi Logistik ke Fasilitas Kesehatan Kusta dan Frambusia	Petugas Dinkes Kab Kota	Dinkes Kab/Kota	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan		Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
					3 Melaksanakan Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dan elektronik tentang pencegahan dan deteksi dini penyakit Kusta dan Frambusia	TV Nasional, TV Lokal, Radio, Koran, Majalah, Leaflet, Poster, Media KIE lainnya	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
					4 Penyusunan dan Penggandaan Buku Pedoman dan Media KIE dalam Pencegahan dan Pengendalian penyakit Kusta dan Frambusia	Masyarakat dan petugas kesehatan	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
					5 Pelaksanaan Vaksinasi Hepatitis B bagi tenaga kesehatan berisiko sebagai tindak lanjut deteksi dini Kusta dan Frambusia	Dokter, bidan, analis	Puskesmas, Rumah sakit	
2	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik	1	Pencegahan dan Pengendalian Malaria	A	Pemberdayaan Masyarakat			
					1 Pertemuan Revitalisasi Posmaldes (Pos Malaria Desa)	Pengelola Program Malaria di Provinsi, Kader, Juru Malaria Desa/Juru Malaria	Provinsi kab/kota	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan	
					Lingkungan			
			2	Pertemuan re-orientasi Eliminasi Malaria	Dinkes Provinsi / Kab / Kota	Provinsi kab/kota		
			3	Penguatan kemandirian masyarakat melalui Pos Malaria Desa (Posmaldes) dan UKBM	Pengelola Program Malaria di Provinsi, Kader, Juru Malaria Desa/Juru Malaria Lingkungan	Provinsi kab/kota		
			4	Penemuan suspek dan pemantauan minum obat serta pengamatan tempat perindukan vektor malaria	Kader/Juru Malaria Desa	Pos Malaria Desa, Puskesmas		
			B Advokasi					
			Penyediaan data dasar dan analisis situasi		Pengelola Program Malaria di Provinsi, Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Kab/Kota	Dinkes Provinsi/ Kab/Kota		
			1	Pengumpulan, pengolahan dan analisa, serta penyajian data kasus malaria, positif konfirmasi malaria, dan cakupan kelambu				

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan		Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
				2	Pelaksanaan pemeriksaan darah malaria	Pengelola Program Malaria di Provinsi, Kader, Juru Malaria Desa/ Juru Malaria Lingkungan	
				3	Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pengendalian malaria di masing-masing daerah (yang sudah ada dan yang belum ada)		
				4	Pelaksanaan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pengendalian malaria		
				5	Pelaksanaan advokasi kepada Kepala Daerah Pemda dan legislatif dalam peningkatan pengendalian malaria		
				6	Advokasi dalam upaya peningkatan menjaga mutu pengendalian malaria		
				7	Sosialisasi kebijakan yang mendukung pengendalian malaria		
				8	Penyusunan regulasi untuk mendukung kebijakan pengendalian malaria		
				9	Sosialisasi tentang Eliminasi malaria		

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			C Kemitraan			
			1 Koordinasi Forum Nasional Gerakan Berantas Kembali Malaria (Gebrak Malaria)	Anggota komisi FNGM	Provinsi	
			2 Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk peningkatan pengendalian penyakit malaria	Dunia usaha		
			3 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam pengendalian penyakit malaria	Akademisi, NGO/LSM		
			4 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan pengendalian penyakit malaria	Akademisi, NGO/LSM		
			5 Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama - kemitraan	Akademisi, NGO/LSM		
			6 Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan	Dinas Kesehatan		
			7 Pertemuan diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah	Forum kesehatan		

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)				
			1	Pelatihan penatalaksanaan malaria bagi dokter di <i>private sector</i> (bekerjasama dengan IDI)	Dokter RS Swasta, praktek pribadi, klinik swasta	Dinkes Provinsi/Kab/Kota	
			2	Pelatihan kapasitas pengelola program malaria dalam pelaksanaan surveilans migrasi/penyelidikan epidemiologi (PE)	Pengelola Program Malaria di Dinkes Prov/Kab/Kota dan KKP	Provinsi	
			E Sarana Prasarana Promotif Preventif				
			1	Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang pengendalian malaria melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang			
			2	Kampanye dan pendistribusian kelambu berinsektisida	Masyarakat	Provinsi, Kab/Kota	
			3	Pengadaan kelambu berinsektisida	Masyarakat	Provinsi, Kab/Kota	
			4	Pengadaan alat rapid test malaria			

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			5 Pencetakan / pendistribusian / penayangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang pengendalian malaria melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang				
		2 Pengendalian Arbovirosis	Pemberdayaan Masyarakat				
			1 Pembentukan (pelatihan) kader Jumantik masyarakat	Masyarakat	Dinkes Kab/Kota/Puskesmas		
			Advokasi				
			Penyediaan data dasar dan analisis situasi				
			1 Pengumpulan, pengolahan dan analisa, serta penyajian data kasus demam berdarah dengue, chikungunya, dan <i>japanese encephalitis</i>	Pengelola program	Dinkes Provinsi/Kab/Kota/rumah sakit/Puskesmas		
			2 Pertemuan revitalisasi Pokjanal DBD	LP/LS Provinsi/Kab/Kota	Dinkes Provinsi/kab/kota		
			3 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pengendalian arbovirosis di masing-masing daerah (yang sudah ada dan yang belum ada)				
		4 Pelaksanaan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pengendalian arbovirosis					

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			5 Pelaksanaan advokasi kepada Kepala Daerah Pemda dan legislatif dalam peningkatan pengendalian arbovirosis			
			6 Advokasi dalam upaya peningkatan menjaga mutu pengendalian arbovirosis			
			7 Sosialisasi kebijakan yang mendukung pengendalian arbovirosis			
			8 Penyusunan regulasi untuk mendukung kebijakan pengendalian arbovirosis			
			9 Sosialisasi Gerakan satu rumah satu Jumantik	LP/LS, LSM, tokoh masyarakat	Dinkes Provinsi/ Kab/ Kota/Puskesmas	
			10 Sosialisasi Jumantik Perkantoran	Penanggung jawab perkantoran dan petugas <i>cleaning service</i>	Dinkes Provinsi/ Kab/ Kota/ Puskesmas	
			11 Sosialisasi Jumantik anak sekolah dan Pramuka	Sekolah SD, SLTP, SLTA/ sederajat, Pramuka	Dinkes Provinsi/ Kab/Kota	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			Kemitraan				
			1	Pembentukan (pelatihan) Jumantik perkantoran	Petugas <i>cleaning service</i>	Dinkes Kab/Kota/Puskesmas	
			2	Pembentukan (pelatihan) Jumantik anak sekolah/ Pramuka	Anak sekolah SD, SLTP, SLTA/ sederajat, Pramuka	Dinkes Kab/Kota/Puskesmas	
			3	Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk peningkatan pengendalian arbovirosis	Dunia usaha		
			4	Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam pengendalian penyakit arbovirosis	Akademisi, NGO/LSM		
			5	Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan pengendalian penyakit arbovirosis	Akademisi, NGO/LSM		
			6	Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama - kemitraan	Akademisi, NGO/LSM		
			7	Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan	Dinas Kesehatan		
			8	Pertemuan diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di	Forum kesehatan		

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah			
Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)						
			1 Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan (pelatihan) dokter di RS	Dokter RS/ Puskesmas	Dinkes Provinsi/ Kab/Kota/ Rumah Sakit	
			2 Peningkatan kapasitas SDM Kesehatan (pelatihan) pengelola program DBD	Pengelola program	Dinkes Provinsi/ Kab/Kota	
			3 Pelatihan (ToT) Jumantik bagi pengelola program DBD Kab/Kota	Pengelola program DBD Kab/Kota	Dinkes Provinsi	
			4 Pelatihan (ToT) Jumantik anak sekolah/ Pramuka pengelola program DBD Kab/Kota	Pengelola program DBD Kab/Kota	Dinkes Provinsi	
Sarana Prasarana Promotif Preventif						
			1 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang pengendalian arbovirosis melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang			

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan		Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
				2 Pengasapan (fogging)	Masyarakat	Dinkes Kab/Kota/ Puskesmas	
				3 Larvasidasi	Masyarakat	Dinkes Kab/Kota/ Puskesmas	
				4 Penggunaan obat anti nyamuk	Masyarakat	Dinkes Kab/Kota/ Puskesmas	
				5 Iklan layanan masyarakat Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik	Masyarakat	Dinkes Provinsi/ kab/kota	
				6 Mesin fogging	Pengelola program	Dinkes Provinsi/ kab/kota	
				7 Insektisida	Pengelola program	Dinkes Provinsi/ kab/kota	
				8 Larvasida	Pengelola program	Dinkes Provinsi/ kab/kota	
				9 Obat anti nyamuk	Pengelola program	Dinkes Provinsi/ kab/kota	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			10 Pencetakan / pendistribusian / penayangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang pengendalian arbovirosis melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang			
		3 Pengendalian Filariasis	A Pemberdayaan Masyarakat			
			1 Pelatihan kader POPM Filariasis/Schistosomiasis	Masyarakat	Kecamatan/ Puskesmas	
			2 Tatalaksana Kasus kronis Filariasis, Kecacingan dan Schistosomiasis	Masyarakat	Kabupaten /Kecamatan /Desa	
			3 Pelaksanaan Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) untuk transportasi Kader			
			B Advokasi			
			Penyediaan data dasar dan analisis situasi			
			1 Pengumpulan, pengolahan dan analisa, serta penyajian data kasus kronis filariasis	Masyarakat dan kader	Puskesmas	
			2 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pengendalian filariasis di masing-masing daerah (yang sudah ada dan yang belum ada)			
			3 Pelaksanaan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pengendalian filariasis			
			4 Pelaksanaan advokasi kepada Kepala Daerah Pemda dan legislatif dalam peningkatan pengendalian filariasis			

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			5 Advokasi dalam upaya peningkatan menjaga mutu pengendalian filariasis			
			6 Sosialisasi kebijakan yang mendukung pengendalian filariasis			
			7 Penyusunan regulasi untuk mendukung kebijakan pengendalian filariasis			
			8 Pertemuan advokasi dan sosialisasi filariasis lintas batas kabupaten endemis		Kabupaten/ provinsi	
			9 Pertemuan advokasi dan Sosialisasi lintas sektor pengendalian Schistosomiasis		Kabupaten/ provinsi	
			C Kemitraan			
			1 Pertemuan Evaluasi pasca POPM	Petugas Puskesmas	Provinsi kab/kota	
			2 Jejaring lintas sektor dalam pengendalian schistosomiasis	Puskesmas, Dinkes Prov Kab/kota	Puskesmas, Dinkes Prov kab/kota	
			3 Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk peningkatan pengendalian filariasis	Dunia usaha		
			4 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam pengendalian penyakit filariasis	Akademisi, NGO/LSM		
			5 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan pengendalian penyakit filariasis	Akademisi, NGO/LSM		

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			6 Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama - kemitraan	Akademisi, NGO/LSM			
			7 Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan	Dinas Kesehatan			
			8 Pertemuan diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah	Forum kesehatan			
			9 Sosialisasi tentang Filariasis, Kecacingan dan Schistosomiasis	Masyarakat	Provinsi kab/kota		
			D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)				
			1 Pelatihan Kader POPM Filariasis dan POPM Schistosomiasis	Kader	Puskesmas		
			2 Pelatihan guru UKS dalam pengendalian cacingan	Kader dan masyarakat pendidik	Puskesmas		
			E Sarana Prasarana Promotif Preventif				
			1 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang pengendalian filariasis melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang				

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			2	Distribusi obat POPM Filariasis/Schistosomiasis dari kabupaten ke kecamatan sampai ke desa	Masyarakat	Kabupaten /Kecamatan /Desa	
			3	Pencetakan / pendistribusian / penayangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang pengendalian filariasis melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang			
		4	Pengendalian Vektor				
			Pemberdayaan Masyarakat				
			1	Pembentukan dan bimbingan kader surveilans vektor	Masyarakat di daerah endemis penyakit tular vektor	Kab/kota endemis penyakit tular vektor	
			Advokasi				
			1	Pengumpulan, pengolahan dan analisa, serta penyajian data situasi vektor (ABJ, daerah reseptif Malaria vektor potensial Malaria) dan data situasi kerentanan vektor terhadap insektisida (Anopheles dan Aedes)		Dinkes Provinsi	
			2	Pertemuan sosialisasi pengendalian vektor kepada lintas sektor (Bangda, DPRD, Bappeda, SKPD, swasta dan lain-lain)	PKK, DPRD, swasta		
			3	Pertemuan pengendalian vektor lintas batas kab/kota dan provinsi			

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			4 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pengendalian vektor di masing-masing daerah (yang sudah ada dan yang belum ada)			
			5 Pelaksanaan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pengendalian vektor	Petugas Pusk, Kab/Kota, seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)	Kab/kota endemis penyakit tular vektor	
			6 Pelaksanaan advokasi kepada Kepala Daerah Pemda dan legislatif dalam peningkatan pengendalian vektor			
			7 Advokasi dalam upaya peningkatan menjaga mutu pengendalian vektor			
			8 Sosialisasi kebijakan yang mendukung pengendalian vektor			
			9 Penyusunan regulasi untuk mendukung kebijakan pengendalian vektor			
			Penyediaan data dasar dan analisis situasi	Petugas pengelola penyakit tular vektor	Puskesmas, Dinkes Kab/Kota,	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			1	Pertemuan sosialisasi dan evaluasi hasil surveilans dan pengendalian vektor	Petugas Pusk, Kab/Kota, PKK	Kab/kota endemis penyakit tular vektor	
Kemitraan							
			1	Kerjasama dengan perusahaan setempat untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan memenuhi kebutuhan logistik pengendalian surveilans (misal:F161 klambu, operasional kader)	Pusk, Dinkes Kab/kota	Kab/kota endemis penyakit tular vektor	
			2	Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk peningkatan pengendalian vektor	Dunia usaha		
			3	Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam pengendalian vektor	Akademisi, NGO/LSM		
			4	Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pengendalian vektor	Akademisi, NGO/LSM		
			5	Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama - kemitraan	Akademisi, NGO/LSM		
			6	Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan	Dinas Kesehatan		
			7	Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak	Forum kesehatan		

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			di bidang kesehatan di masing-masing daerah			
			Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)			
			1 Pelatihan surveilans vektor (identifikasi, mapping, resistensi, efikasi dan lain-lain)	Petugas Puskesmas, Kab/Kota, dan Prov	Puskesmas, Dinkes Kab/Kota dan Dinkes Prov	
			2 Pelatihan pengendalian vektor Malaria dan DBD	Kader/ petugas penyemprot, JMD		
			Sarana Prasarana Promotif Preventif			
			1 Penyuluhan secara berkala melalui media audio visual (Radio & TV) secara berkala sebelum musim penularan dan pada situasi KLB	Masyarakat umum	Kab/kota endemis penyakit tular vektor	
			F Pemberdayaan masyarakat			
			1 Pembentukan dan bimbingan kader surveilans vektor	Masyarakat di daerah endemis penyakit tular vektor	Kab/kota endemis penyakit tular vektor	
			2 Penyediaan bahan dan alat untuk melaksanakan surveilans vektor (larvasida untuk vektor stadium pradewasa, klambu berinsektisida, entomologi kit)	Puskesmas, Dinkes Kab/Kota dan Dinkes	34 provinsi	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
					Provinsi		
			3	Pencetakan / pendistribusian / penayangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang pencegahan serta pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit potensial lokasi setempat melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang	Masyarakat umum	Kab/kota endemis penyakit tular vektor	
3	Imunisasi	1	Imunisasi Dasar: Dasar: imunisasi dasar lengkap pada bayi 0-11 bulan termasuk introduksi vaksin baru, penggantian vaksip tOPV menjadi bOPV	A Pemberdayaan Masyarakat			
			1	Forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi	Bayi 0-11 bulan	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas	Tokoh masyarakat, tokoh agama, LS/LP, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, swasta, kader, masyarakat, dan lain-lain

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			2	Kunjungan rumah jika diperlukan termasuk <i>sweeping</i> imunisasi dan DOFU (<i>Drop Out Follow-Up</i>)	Bayi 0-11 bulan	Puskesmas /posyandu /pos pelayanan lain	Petugas Kesehatan didampingi kader kesehatan	
			B Advokasi					
			1	Pendataan sasaran	Bayi 0-11 bulan	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas		
			2	Analisis situasi dan perencanaan kegiatan		Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas		
			3	Pelaksanaan Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)		Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas		
			4	Validasi data hasil cakupan imunisasi		Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas		
			5	Pemetaan kebijakan yang mendukung program imunisasi di tingkat (yang sudah ada dan yang belum ada)	Bayi 0-11 bulan	Provinsi, Kab/Kota		
			6	Melaksanakan advokasi/sosialisasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi dasar		Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas		

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			7	Sosialisasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi dasar		Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas		
			8	Rapat koordinasi (internal program dengan lintas program maupun lintas sektor)		Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas		
			C Kemitraan					
			1	Rapat koordinasi program imunisasi dengan stakeholder terkait termasuk swasta	Bayi 0-11 bulan	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas		
			2	Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk peningkatan cakupan imunisasi	Dunia usaha	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas		
			3	Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam peningkatan cakupan imunisasi	Akademisi, NGO/LSM	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas		
			4	Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan cakupan imunisasi	Akademisi, NGO/LSM	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas		
			5	Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama - kemitraan	Akademisi, NGO/LSM	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas		
			6	Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan	Dinas Kesehatan	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas		

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			7	Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah	Forum kesehatan	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas		
			D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)					
			1	Peningkatan kapasitas pengelola imunisasi: Introduksi vaksin baru, EVM (Effective Vaccine Management), Data Quality Self Assessment (DQS), Manajemen data program (pencatatan dan pelaporan), surveilans/investigasi KIPI, manajemen program, strategi komunikasi, dan lain-lain sesuai kebutuhan	Bayi 0-11 bulan	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas	EVM (Effective Vaccine Management), Data Quality Self Assessment (DQS), Manajemen data program (pencatatan dan pelaporan), Surveilans/ Investigasi KIPI, manajemen program, strategi komunikasi	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan		Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
				2	Peningkatan kapasitas petugas pemberi pelayanan imunisasi: Introduksi vaksin baru, surveilans/investigasi KIPI, teknis pelayanan imunisasi, strategi komunikasi, dan lain-lain sesuai kebutuhan di lapangan		Puskesmas	EVM (Effective Vaccine Management), Data Quality Self Assessment (DQS), Manajemen data program (pencatatan dan pelaporan), Surveilans/ Investigasi KIPI, teknis pelayanan imunisasi, strategi komunikasi

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			3 Peningkatan kapasitas kader imunisasi: Peningkatan kapasitas kader dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran, pelaksanaan imunisasi, sistem pencatatan dan pelaporan, dan lain-lain sesuai kebutuhan di lapangan		Puskesmas	Peningkatan kapasitas kader dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran, sistem pencatatan dan pelaporan
			E Sarana Prasarana Promotif Preventif			
			1 Distribusi vaksin, ADS dan safety box	Bayi 0-11 bulan	Provinsi dan kab/kota	
			2 Pengadaan Vaccine Carrier		Provinsi dan kab/kota	
			3 Pelaksanaan imunisasi dasar di Pos Pelayanan Imunisasi (Posyandu, Puskesmas, Poskesdes, Polindes, Pos Pelayanan lainnya yang ditentukan)	Bayi 0-11 bulan	Puskesmas /posyandu /pos pelayanan lain	Petugas Kesehatan didampingi kader kesehatan
			4 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang imunisasi	Bayi 0-11 bulan	Provinsi dan kab/kota	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan	
				melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang				
		2	Imunisasi Lanjutan	A	Pemberdayaan Masyarakat			
				1	Forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi	Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas	Tokoh masyarakat, tokoh agama, LS/LP, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, swasta, kader, masyarakat, dan lain-lain
				2	Kunjungan rumah jika diperlukan	Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS	Puskesmas /posyandu /pos pelayanan lain, sekolah	Petugas Kesehatan didampingi kader kesehatan

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			B Advokasi			
			1	Pendataan sasaran	Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas
			2	Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)		
			3	Validasi data hasil cakupan imunisasi		
			4	Analisis situasi dan perencanaan kegiatan		Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas
			5	Pemetaan kebijakan yang mendukung program imunisasi di tingkat (yang sudah ada dan yang belum ada)	Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS	Provinsi, Kab/Kota
			6	Melaksanakan advokasi yang mendukung program imunisasi		Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas
			7	Sosialisasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi lanjutan		Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas
			8	Rapat koordinasi program imunisasi (internal program dengan lintas program maupun lintas sektor)		Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas
			C Kemitraan			
			1	Rapat koordinasi program imunisasi dengan stakeholder terkait termasuk swasta	Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan		Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
				2 Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk peningkatan cakupan imunisasi	Dunia usaha	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas	
				3 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam peningkatan cakupan imunisasi	Akademisi, NGO/LSM	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas	
				4 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan cakupan imunisasi	Akademisi, NGO/LSM	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas	
				5 Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama - kemitraan	Akademisi, NGO/LSM	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas	
				6 Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan	Dinas Kesehatan	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas	
				7 Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah	Forum kesehatan	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan		Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
				D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Peningkatan kapasitas pengelola imunisasi dalam rangka mendukung kegiatan imunisasi lanjutan pada batita, anak usia sekolah dan wanita usia subur (sesuai kebutuhan di lapangan)	Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas	EVM (Effective Vaccine Management), Data Quality Self Assessment (DQS), Manajemen data program (pencatatan dan pelaporan), Surveilans/ Investigasi KIPI, manajemen program, strategi komunikasi

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			2 Peningkatan kapasitas petugas pemberi layanan imunisasi untuk mendukung kegiatan imunisasi lanjutan pada batita, anak usia sekolah dan wanita usia subur meliputi: surveilans/investigasi KIPI, teknis pelayanan imunisasi dan strategi komunikasi		Puskesmas	EVM (Effective Vaccine Management), Data Quality Self Assessment (DQS), Manajemen data program (pencatatan dan pelaporan), Surveilans/ Investigasi KIPI, teknis pelayanan imunisasi, strategi komunikasi

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			3 Peningkatan kapasitas kader imunisasi dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran, pelaksanaan imunisasi, sistem pencatatan dan pelaporan, dan lain-lain sesuai kebutuhan di lapangan untuk mendukung kegiatan imunisasi lanjutan pada batita, anak usia sekolah, dan wanita usia subur (sesuai kebutuhan di lapangan)		Puskesmas	Peningkatan kapasitas kader dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran, sistem pencatatan dan pelaporan
			E Sarana Prasarana Promotif Preventif			
			1 Distribusi vaksin, ADS dan safety box	Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS	Provinsi dan kab/kota	
			2 Pengadaan Vaccine Carrier	Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS	Provinsi dan kab/kota	
			3 Pelaksanaan imunisasi lanjutan di Pos Pelayanan Imunisasi (Posyandu, Puskesmas, Poskesdes, Polindes, PAUD, sekolah, Pos Pelayanan lainnya yang ditentukan)	Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS	Puskesmas /posyandu /pos pelayanan lain, sekolah	Petugas Kesehatan didampingi kader kesehatan

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
			4	Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang imunisasi lanjutan melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang	Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS	Provinsi, Kab/Kota	
		3 Imunisasi Tambahan: imunisasi tambahan pada bayi, batita, balita, anak usia sekolah, meliputi Pekan Imunisasi Nasional (PIN), cash program, backlog fighting dan imunisasi dalam rangka penanganan KLB (outbreak respon	A	Pemberdayaan Masyarakat			
			1	Forum komunikasi imunisasi dan masyarakat peduli imunisasi	Bayi 0-11 bln, Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas	Tokoh masyarakat, tokoh agama, LS/LP, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, swasta, kader, masyarakat, dan lain-lain
			2	Kunjungan rumah jika diperlukan	Bayi 0-11 bln, Batita, Anak Usia	Puskesmas / posyandu / pos	Petugas Kesehatan didampingi

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
		imunization/O RI)			Sekolah, dan WUS	pelayanan lain	kader kesehatan
			B Advokasi				
			1	Pendataan sasaran	Bayi 0-11 bln, Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas	
			2	Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)			
			3	Validasi data hasil cakupan imunisasi			
			4	Analisis situasi dan perencanaan kegiatan		Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas	
			5	Pemetaan kebijakan yang mendukung program imunisasi di tingkat (yang sudah ada dan yang belum ada)	Bayi 0-11 bln, Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS	Provinsi, Kab/Kota	
			6	Melaksanakan advokasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi tambahan		Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas	
			7	Rapat koordinasi (internal program dengan lintas program maupun lintas sektor)			
			8	Sosialisasi/lokakarya dengan lintas program dan lintas sektor terkait program imunisasi		Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas	
			9	Rapat koordinasi program imunisasi		Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			C Kemitraan			
			1 Rapat koordinasi program imunisasi dengan stakeholder terkait termasuk swasta	Bayi 0-11 bln, Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas	
			2 Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk peningkatan cakupan imunisasi	Dunia usaha	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas	
			3 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam peningkatan cakupan imunisasi	Akademisi, NGO/LSM	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas	
			4 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan cakupan imunisasi	Akademisi, NGO/LSM	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas	
			5 Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama – kemitraan	Akademisi, NGO/LSM	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas	
			6 Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan	Dinas Kesehatan	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas	
			7 Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah	Forum kesehatan	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)			
			1 Peningkatan kapasitas pengelola imunisasi dalam rangka mendukung kegiatan imunisasi tambahan, dalam hal ini PIN, Crash Program Campak, casklog fighting, dan penanganan KLB (ORI)	Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas	Manajemen program, strategi komunikasi
			2 Peningkatan kapasitas petugas imunisasi dalam rangka mendukung kegiatan imunisasi tambahan, dalam hal ini PIN Polio, Crash Program Campak, casklog fighting dan penanganan KLB (ORI)		Puskesmas	Teknis pelayanan imunisasi, strategi komunikasi
			3 Peningkatan kapasitas kader imunisasi dalam rangka mendukung kegiatan imunisasi tambahan, dalam hal ini PIN Polio, Crash Program Campak, casklog fighting dan penanganan KLB (ORI)		Puskesmas	Peningkatan kapasitas kader dalam berkomunikasi dengan kelompok sasaran, sistem pencatatan dan pelaporan
			E Sarana Prasarana Promotif Preventif			
			1 Distribusi vaksin, ADS dan safety box	Bayi 0-11 bln, Batita,	Provinsi dan kab/kota	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			2 Pengadaan Vaccine Carrier	Anak Usia Sekolah, dan WUS	Provinsi dan kab/kota	
			3 Pelaksanaan imunisasi dasar di Pos Pelayanan Imunisasi (Posyandu, Puskesmas, Poskesdes, Polindes, Pos Pelayanan lainnya yang ditentukan)	Bayi 0-11 bln, Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS	Puskesmas / posyandu / pos pelayanan lain	Petugas Kesehatan didampingi kader kesehatan
			4 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang imunisasi lanjutan melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang	Bayi 0-11 bln, Batita, Anak Usia Sekolah, dan WUS	Provinsi, Kab/Kota	

UPAYA PROMOTIF PREVENTIF UNTUK MENINGKATKAN PROMOSI KESEHATAN

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
1	Promosi Kesehatan	1 Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	A Advokasi 1 Pengumpulan, pengolahan dan analisa, serta penyajian data Keluarga Sehat 2 Pemetaan dan rekapitulasi data potensi sumberdaya pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan dalam pengembangan UKBM 3 Analisis dan perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan 4 Seminar Kajian Analisa Situasi Data PHBS dan Keluarga Sehat	Masyarakat /petugas kesehatan/ kader/ Tokoh Masyarakat Puskesmas, Poskesdes, Pemesdes/ Tapem, Dinkes Kab/Kota Petugas Puskesmas, Poskesdes, Pustu, Dinkes Kab/Kota Lintas Program, Lintas Sektor,	Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Pustu, Poskesdes, Puskesmas, Dinkes Kab/Kota Tempat Pertemuan /Dinkes Kab/Kota/	Melibatkan LKMD, KPM/ Fasilitator/ Pendamping, Aparat Desa

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
				Organisasi Profesi, Akademisi	Prov		
			5 Pelaksanaan advokasi formasi dan pengadaan tenaga promosi kesehatan di Kabupaten/Kota				
			6 Penggalangan komitmen berbagai pengambil keputusan untuk penguatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan isu/permasalahan lokal	Petugas Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi		
			7 Advokasi lintas sektor mendukung gerakan masyarakat	Pemda, Pengambil Keputusan	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi		
			8 Penyusunan berbagai regulasi sehat tingkat kecamatan/desa/kelurahan	Stakeholder dan pihak pemerintah	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi		
			B Kemitraan				
			1 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam upaya promosi kesehatan	Akademisi, NGO/LSM			
			2 Pertemuan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan forum kesehatan di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah	Forum kesehatan			

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			3	Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk kegiatan promosi kesehatan	Dunia usaha		
			4	Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama - kemitraan	Akademisi, NGO/LSM		
			5	Kampanye Kesehatan			
			6	Pengembangan dan pengadaan material KIE			
			7	Pameran kesehatan			
			8	Diseminasi di tingkat kecamatan tentang berbagai upaya pemberdayaan masyarakat kepada stakeholder tingkat kecamatan/kelurahan/Desa	Tokoh masyarakat, ToGa, Ormas, pihak swasta, kelompok/ forum kecamatan	Kecamatan, Puskesmas, Balai rakyat	
			9	Pertemuan / forum berkala dalam peningkatan koordinasi dalam pembinaan berbagai UKBM	Anggota forum peduli kesehatan/ pegelola berbagai UKBM	Kecamatan, kab/kota	

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			C Pemberdayaan masyarakat			
			1 Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD)	Toma, Toga, kader, stakeholder lainnya	Desa/ Kelurahan	
			2 Pengembangan model-model pemberdayaan masyarakat (tatanan, wilayah, isu, kebijakan dan lain-lain)	Petugas Puskesmas	Desa/ Kelurahan	
			3 Pendampingan keluarga menuju Keluarga Sehat	Petugas Puskesmas, Petugas Kab/Kota	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			4 Monitoring dan Evaluasi	Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	Puskesmas, Desa/Kelurahan	
			5 Pembinaan Toga dan Toma	Toga, Toma dan Karang Taruna	Kecamatan/ Kab/Kota	
			D Peningkatan Kapasitas SDM			
			1 Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota/Provinsi	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Bapelkes	

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			2	Peningkatan tenaga promosi kesehatan melalui Pelatihan Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/ Kota	
			3	Pelatihan Promosi Kesehatan bagi Petugas Puskesmas	Petugas Puskesmas	Puskesmas	
			4	Peningkatan kapasitas tenaga promosi kesehatan melalui Pelatihan Teknis Pengembangan Media Promosi Kesehatan	Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota/ Provinsi	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Bapelkes	
			5	Peningkatan kapasitas tenaga promosi kesehatan melalui Pelatihan Teknis Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dalam Pemberdayaan Masyarakat	Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Bapelkes	
			6	Peningkatan kapasitas tenaga promosi kesehatan melalui Pelatihan Kemitraan dan CSR	Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota/ Provinsi	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Bapelkes	
			7	Peningkatan kapasitas petugas promosi kesehatan di Rumah Sakit melalui Pelatihan Promosi Kesehatan di Rumah Sakit	Petugas PKRS di RS	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi,	

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
					Rumah Sakit		
			8 Pelatihan/orientasi Keluarga Sehat	Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota/Provinsi	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Bapelkes		
			9 Peningkatan kapasitas Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	Dinkes Kab/Kota		
			10 Peningkatan kapasitas bagi bidan/perawat Poskesdes	Tenaga kesehatan di Poskesdes	kecamatan, Dinkes Kab/Kota		
			11 Peningkatan kapasitas Kader Poskesdes dan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Kader Poskesdes/ Kesehatan	kecamatan, Dinkes Kab/Kota		
			12 Peningkatan kapasitas Aparat Desa	Aparat Desa	Puskesmas		
			13 Peningkatkan Kapasitas Tokoh Masyarakat	Toma, Toga	Puskesmas		
			E Sarana Prasarana Promotif Preventif				
			1 Pengadaan mobil unit promosi kesehatan	Provinsi, Puskesmas, Kab/Kota	Provinsi, Puskesmas, Kab/Kota		

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan		Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
				2	Pengadaan motor promosi kesehatan bagi petugas Puskesmas	Provinsi, Puskesmas, Kab/Kota	Provinsi, Puskesmas, Kab/Kota	
				3	Pengadaan peralatan promosi kesehatan (Promkes Kit)	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas, Rumah Sakit	Provinsi, Kab/Kota, Puskesmas, Rumah Sakit	
				4	Pengadaan eksibision kit (peralatan pameran)	Provinsi, Kab/Kota	Provinsi, Kab/Kota	
				5	Pengadaan UKBM Kit	Kader, Tenaga kesehatan di Yankesdas	Kab/Kota	
				6	Penyusunan media sederhana untuk hasil-hasil pemberdayaan masyarakat, aktivitas UKBM	Stakeholder tingkat kec/desa	Dinkes Kab/Kota; Dinkes Provinsi, Puskesmas	
		2	Pembinaan Saka Bakti Husada	A	Kemitraan			
				1	Membentuk Forum Komunikasi Saka Bakti Husada	Dinkes Kab/Kota, Kwarcab DKD , DKC	Lintas Program Dinkes(6 Krida SBH)	

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			B Pemberdayaan masyarakat				
			1	Fasilitasi pengabdian masyarakat melalui Saka Bakti Husada	Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Kwarcab, Kwarran, Pramuka SBH	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota	
			2	Sosialisasi dan penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai saluran media bagi generasi muda	Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Kwarcab, Kwarran, Pramuka SBH	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota	
			3	Latihan Saka secara berkala yang dilaksanakan diluar hari latihan gugus depannya.			
			4	Kegiatan berkala yang dilaksanakan untuk kepentingan tertentu misalnya menyiapkan diri untuk lomba, kegiatan ulang tahun saka dan sebagainya.			
			5	Perkemahan Saka Bakti Husada	Anggota Saka Bakti Husada dan Pembina	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota	

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			C Peningkatan kapasitas SDM				
			1	Peningkatan Kelembagaan Saka Bakti Husada	Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Kwarcab, Kwarran	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota	
			2	Orientasi Pamong dan Instruktur Saka Bakti Husada	Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Kwarcab, Kwarran	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota	
			D Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat				
			1	Pengembangan Media KIE Saka Bakti Husada	Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Kwarcab, Kwarran, Pramuka SBH	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota	
			2	Kelengkapan Sekertariat Saka Bakti Husada	Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Kwarcab, Kwarran, Pramuka SBH	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota	

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
		3	<p>Penguatan Peran Serta ormas dan kelompok potensial di masyarakat yang peduli kesehatan</p>			
			<p>A Kemitraan</p> <p>1 Sosialisasi dan penyebarluasan informasi kesehatan melalui berbagai saluran media bagi ormas dan kelompok potensial</p>	Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Ormas/Kelompok Potensial	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota	
			<p>B Pemberdayaan masyarakat</p> <p>1 Fasilitasi pengabdian masyarakat melalui ormas dan kelompok potensial</p>	Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Ormas/Kelompok Potensial	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota	
			<p>C Peningkatan kapasitas SDM</p> <p>1 Penguatan Forum Peran Serta ormas dan kelompok potensial</p> <p>2 Orientasi Tokoh masyarakat dan pemimpin kelompok potensial</p>	Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Ormas/Kelompok Potensial	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota	

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan			Sasaran	Lokasi	Keterangan	
						Potensial			
			D Penyediaan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Masyarakat						
			1	Pengembangan Media KIE Ormas		Dinkes Kab/Kota Puskesmas, Ormas/Kelo mpok Potensial	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota		

UPAYA PROMOTIF PREVENTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN KELUARGA

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
1	Kesehatan Keluarga	1 Pelayanan kesehatan Maternal dan Neonatal Pelayanan kesehatan balita dan anak pra sekolah Pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi Pelayanan Kesehatan Lanjut usia	A Pemberdayaan Masyarakat 1 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah bagi Tim Pembina dan Tim Pelaksana UKS 2 Pertemuan akselerasi Pembinaan dan pelaksanaan UKS 3 Pembentukan Sekretarian Tim Pembina UKS 4 Mengadakan Pembinaan kepada Dukun, Kader Kesehatan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak 5 Pemberdayaan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, Guru dan lainnya mengenai pengetahuan kesehatan keluarga (maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia)	Setda/Bappeda, Dinas Pendidikan, Kanwil Agama, Dinas Kesehatan, Sekolah, Puskesmas Tenaga Kesehatan, Tenaga Pendidik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat	Sekolah, Puskesmas, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi Sekolah, Puskesmas, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
				lainnya		
			6 Pembentukan dan pemberdayaan kelompok penggerak kesehatan keluarga (maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia)	Tenaga Pendidik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat lainnya		
			7 Optimalisasi kegiatan berbasis Posyandu dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya peningkatan kesehatan keluarga (maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia)	Tenaga Pendidik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat lainnya		
			8 Sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan dukungan keluarga untuk menjaga kesehatan ibu hamil (fisik, mental dan sosial)	Keluarga ibu hamil	Dinas Kesehatan, Puskesmas,	
			9 Pelaksanaan kelas ibu hamil	Ibu hamil		
			10 Kemitraan bidan dan dukun	Bidan dan dukun		

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			11	Pemberdayaan perorangan (guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain) mengenai pengetahuan kesehatan ibu, anak dan KB	Guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain	
			12	Optimalisasi kegiatan berbasis Posyandu dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak	Posyandu	
			13	Pendampingan ibu hamil	Ibu hamil	
			14	Pemberdayaan Forum Masyarakat Madani (Forum Peduli Kesehatan Ibu)	Masyarakat	
			15	Penguatan Kemitraan Bidan dan Dukun melalui penguatan peran dukun, tokoh agama dan tokoh masyarakat	Bidan dan dukun	
			16	Penguatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Rumah Tunggu Kelahiran	Masyarakat	
			17	Pembinaan kesehatan anak usia sekolah dan remaja yang ada di sekolah dan luar sekolah	Anak usia sekolah dan remaja	
			18	Pembiayaan kegiatan yang menunjang operasional posyandu, posbindu, poskestren, UKS, dan lain-lain	Tenaga Pendidik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
				masyarakat lainnya			
			19 Kegiatan pendampingan oleh kader/konselor kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan anak	Tenaga Pendidik, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan masyarakat lainnya			
			20 Pelayanan Konseling Kesehatan Remaja di luar jam kerja	Remaja			
			B Advokasi				
			Penyediaan data dasar dan analisis situasi				
			1 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan KIA-KB- Lansia				
			2 Penyediaan data dasar maternal & neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, remaja, PUS dan lansia	Maternal (termasuk suami dan keluarga) & Neonatal,	Kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, Pos Pelayanan Terpadu		
			3 Mendata ketersediaan transportasi rujukan di lingkungan ibu	Anak Balita, prasekolah,			
			4 Mendata calon pendonor darah bagi ibu hamil				
			5 Mendata pembiayaan untuk persalinan				

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			6	Rekapitulasi data kesehatan maternal & neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, remaja dan lansia	Anak Usia Sekolah dan Remaja (di dalam ataupun luar sekolah), PUS, Lansia	(Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) / Pondok Bersalin Desa (Polindes), rumah, kelas ibu, rumah tunggu
			7	Pelaksanaan surveilans faktor risiko AKI, AKB, Lanjut Usia		
			8	Pelaksanaan surveilans kesehatan anak, kematian Ibu di Masyarakat maupun FKTP		
			9	Pembuatan sistem informasi manajemen data kesehatan maternal & neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, remaja dan lansia		
			10	Pembuatan <i>factsheet</i> /buletin/Laporan/penelitian secara berkala terkait masalah dan upaya peningkatan kesehatan maternal & neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, remaja dan lansia		
			11	Validasi data hasil cakupan berdasarkan data SP2TP		
			12	Mengadakan Pengkajian Audit Maternal Perinatal tingkat kab/kota		
			13	Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya kesehatan keluarga di masing-masing daerah (yang sudah ada dan yang belum ada)	Petugas kesehatan	
			14	Pemeriksaan golongan darah pada seluruh penduduk yang belum diperiksa tujuan untuk mendapatkan <i>mapping</i> calon pendonor darah	Tenaga kesehatan	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			15	Pemeriksaan kesehatan maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu, Puskesmas, Pos Pelayanan lainnya yang ditentukan, dan kunjungan rumah jika diperlukan)	Posyandu		
			16	Pemeriksaan golongan darah, Hb, gula darah dan test kehamilan untuk ibu hamil di posyandu, puskesmas dan pos pelayanan kesehatan lainnya yang ditentukan serta kunjungan rumah jika perlu	Ibu hamil		
			17	Penjaringan Kesehatan Peserta didik Kelas 1,7 dan 10	Peserta didik	Sekolah, puskesmas	
			18	Pemeriksaan Berkala Peserta Didik	Peserta didik	Sekolah, puskesmas	
			19	Skrining hipotiroid kongenital	Bayi	Puskesmas, RS	
			Sosialisasi				
			1	Sosialisasi Peraturan, Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Terkait upaya kesehatan maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia	Pemerintah, Non Pemerintah, Masyarakat	Sekolah, Puskesmas, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi	
			2	Sosialisasi dampak merokok bagi kesehatan maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah,	Tenaga Kesehatan,	Sekolah, Kecamatan,	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia	Tenaga Pendidik, dan masyarakat lainnya	kabupaten/kota, provinsi	
			3 Sosialisasi/lokakarya dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk Kesehatan maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia			
			4 Sosialisasi kebijakan yang mendukung pendewasaan usia pernikahan, pemeriksaan kesehatan dan pemberian KIE Kespro bagi catin	Calon pengantin (catin)		
			5 Pelaksanaan advokasi kebijakan yang mendukung upaya kesehatan keluarga	Pengambil keputusan		
			6 Pelaksanaan advokasi kepada Kepala Daerah Pemda dan legislatif dalam peningkatan pelayanan KB dan Lansia	Pengambil keputusan		
			7 Advokasi dalam upaya peningkatan jaga mutu pelayanan KIA, KB, Lansia	Pengambil keputusan		
			8 <i>Feedback</i> hasil Audit Maternal Perinatal dengan Lintas sektor	Lintas sektor		
			9 Penyusunan Regulasi untuk mendukung kebijakan pelayanan Kesehatan keluarga	Pengambil keputusan		

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			10 Advokasi kebijakan yang mendukung upaya kesehatan Kesehatan maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia	Pemerintah, Non Pemerintah, Masyarakat	Sekolah, Puskesmas, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi		
			C Kemitraan				
			1 Penyusunan MoU dan kerjasama - kemitraan dengan institusi pendidikan dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga (maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia)	Institusi pendidikan, Akademisi, NGO/LSM	Sekolah, Puskesmas, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Provinsi		
			2 Penyusunan MoU dan kerjasama - kemitraan dengan mitra swasta (peningkatan CSR) dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga (maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia)	Perusahaan			
			3 Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam kesehatan keluarga	Akademisi, NGO/LSM			
			4 Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga	Akademisi, NGO/LSM			
			5 Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan	Dinas Kesehatan			

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			6 Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah	Forum kesehatan		
			D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)			
			1 Pelatihan Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS	Kecamatan, kabupaten/kota, provinsi	
			2 Pelatihan Pelayanan Kesehatan Balita dan anak Pra sekolah			
			3 Pelatihan Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja			
			4 Pelatihan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia dan Geriatri			
			5 Pelatihan Tatalaksanaan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan/Anak			
			6 <i>Capacity building</i> Kesehatan keluarga bagi kader, dukun yang bermitra, kelompok kerja, atau jejaring KIA di masing-masing daerah			
			7 Pelatihan bagi mahasiswa institusi pendidikan kesehatan, kelompok kerja, sukarelawan, jejaring lainnya dalam upaya pendampingan ibu hamil dan ibu bersalin serta ibu nifas.			
			8 Peningkatan kapasitas petugas Puskesmas dalam Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak			

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			9	Pelatihan/orientasi bagi dosen tentang MTBS, SDIDTK, Yankes Anak Usia Sekolah dan Remaja, Buku KIA dan Rapor Kesehatanku		
			10	Pelatihan/Orientasi MTBS		
			11	Pelatihan/Orientasi Buku KIA dan Juknis KIA		
			12	Pelatihan/Orientasi Buku Rapor Kesehatanku dan Juknisnya		
			13	Pelatihan/Orientasi kesehatan anak usia sekolah dan remaja bagi mahasiswa kesehatan		
			14	Pelatihan/Orientasi standar nasional PKPR		
			15	Pelatihan/ Orientasi Tenga kesehatan dalam surveilans kelainan bawaan berbasis RS		
			16	Pelatihan/orientasi bagi tenaga kesehatan dalam penanganan kelainan tumbuh kembang balita		
			17	Pelatihan / Orientasi Kader Kesehatan Anak		
			18	Pelatihan/orientasi SDIDTK		
			19	Pelatihan/ oreintasi kader kesehatan (konselor sebaya, kader kesehatan remaja, dokter kecil)	Peserta didik SMP/SMA sederajat	Sekolah, Kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi
			20	Jambore/Peningkatan Kapasitas Konselor sebaya	Peserta didik SMP/SMA sederajat	Kabupaten/ kota, provinsi

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			E Sarana Prasarana Promotif Preventif			
			1 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang kesehatan maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang	Dinas Kesehatan, Puskesmas, RS	Kabupaten/ kota, provinsi	
			2 Dukungan operasional kader dalam pelaksanaan pendampingan bagi kesehatan keluarga (maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia) oleh kader	Kader		
			3 Dukungan operasional tenaga kesehatan dalam pelaksanaan pendampingan bagi kesehatan keluarga (maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia)	Tenaga kesehatan		
			4 Pencetakan dan distribusi buku buku terkait kesehatan keluarga	Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten/ Kota	Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten/ Kota	
		5 Pengadaan dan Distribusi Paket Kelas Ibu (Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu Balita)				
		6 Pencetakan dan Distribusi Lembar Balik ABPK - KB				

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			7	Pencetakan / pendistribusian / penayangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang kesehatan keluarga melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang		
			8	Penyediaan logistik (alat dan bahan) alat deteksi risiko pada ibu hamil		
			9	Pengadaan Bidan Kit termasuk didalamnya tedapat ANC Kit		
			10	Penyediaan sarana untuk Rumah Tunggu Kelahiran		
			11	Penyediaan alat pengolah data untuk pencatatan dan pelaporan Pelayanan Kesehatan keluarga		
			12	Dukungan operasional pelaksanaan kelas ibu hamil, seperti : konsumsi, sarana tikar, dan sarana lainnya		
			13	Pengadaan dan distribusi buku rapor kesehatanku	Maternal (termasuk suami dan keluarga) & Neonatal, Anak Balita, prasekolah, Anak Usia Sekolah dan	Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten/ Kota
			14	Pengadaan dan distribusi pedoman perencanaan dan pelaksanaan pkpr		
			15	Pengadaan dan distribusi UKS Kit		
			16	Pengadaan dan distribusi PKPR Kit		
			17	Pengadaan dan distribusi Lansia Kit		
			-	Pengadaan dan distribusi kesehatan lansia/buku pemantauan pribadi kesehatan lansia		

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			- pengadaan dan distribusi form instrumen untuk skrining kesehatan lansia (form pengkajian paripurna pelayanan geriatri/P3G)	Remaja (di dalam ataupun luar sekolah), PUS, Lansia		
			- Pengadaan dan distribusi form pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan lansia di puskesmas dan jaringannya			
		18	Pengadaan dan distribusi regulasi terkait upaya kesehatan dalam upaya peningkatan kesehatan keluarga (maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia)			
		19	Pengadaan dan distribusi peralatan dan bahan SHK			
		20	Pencetakkan dan distribusi panduan/pedoman kesehatan keluarga (maternal& Neonatal, anak balita, pra sekolah, anak usia sekolah, dan remaja, Usia reproduksi, Lansia)			
		21	Pembiayaan alat kesehatan penunjang tindak lanjut dari penjarangan/pemeriksaan berkala (kacamata, alat bantu dengar, dan lain-lain)			

UPAYA PROMOTIF PREVENTIF UNTUK MENINGKATKAN GIZI

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Ket
1	Upaya Peningkatan Gizi	1	<p data-bbox="775 443 1697 491">A Pemberdayaan Masyarakat</p> <p data-bbox="775 491 1697 735">1 Mengadakan sosialisasi /lokakarya dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/ swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk percepatan perbaikan gizi</p> <p data-bbox="775 735 1697 887">2 Sosialisasi media KIE dalam rangka percepatan perbaikan gizi</p> <p data-bbox="775 887 1697 999">- Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) dalam buku KIA bagi tenaga kesehatan dan kader kesehatan</p> <p data-bbox="775 999 1697 1110">- Penyediaan alat peraga Penyuluhan Gizi Masyarakat</p> <p data-bbox="775 1110 1697 1214">3 Pemilihan duta ibu hamil gizi baik, balita gizi baik, dan remaja putri bebas anemia, Ayah ASI, Kader Teladan di wilayah kerja</p> <p data-bbox="775 1214 1697 1351">4 Sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka mendapatkan dukungan keluarga terhadap pelaksanaan ASI Eksklusif</p>	<p data-bbox="1697 443 2001 735">Lintas Sektor di Prov (Bappeda), BPK,Pembangunan masyarakat desa, TPPKK, Diknas Provinsi, Pemda</p> <p data-bbox="1697 735 2001 887">Masyarakat, anak Sekolah, Keluarga, Kader, Petugas Gizi Puskesmas</p> <p data-bbox="1697 887 2001 999"></p> <p data-bbox="1697 999 2001 1110">Petugas Gizi Puskesmas, Kader</p> <p data-bbox="1697 1110 2001 1214">Bumil, Remaja Puteri, Balita</p> <p data-bbox="1697 1214 2001 1351">Ibu hamil, Ibu menyusui, Balita, Ayah</p>	<p data-bbox="2001 443 2207 735">34 Propinsi</p> <p data-bbox="2001 735 2207 887">Sekolah, Puskesmas, Kec, Kab/Kota</p> <p data-bbox="2001 887 2207 999"></p> <p data-bbox="2001 999 2207 1110">Puskesmas, Sekolah, Kab/Kota</p> <p data-bbox="2001 1110 2207 1214">Desa, Kec, Kab/kota</p> <p data-bbox="2001 1214 2207 1351">Desa, Kec, Kab/Kota</p>	

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Ket
		Pemberdayaan kelompok peduli gizi	5	Pemberdayaan perorangan (guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, dll) mengenai pengetahuan gizi			
		Pemberdayaan kelompok peduli gizi	6	Pembentukan dan pemberdayaan kelompok-kelompok penggerak gizi	PKK, Karang Taruna, kelompok ibu, kelompok pendukung Asi, Dasa Wisma, kelompok orang tua	Desa, Kec, Kab/Kota	
			7	Konseling/bimbingan tenaga kesehatan	Ibu hamil, Ibu menyusui dan Balita, bayi dan anak	Sekolah, Puskesmas, Kec, Kab/Kota	
		Pemantauan pertumbuhan	8	Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan kelompok oleh kader kesehatan	Remaja Puteri, Ibu hamil, Ibu Nifas, Bayi 6-59 bulan		
			9	Optimalisasi kegiatan berbasis posyandu dan pemberdayaan kader kesehatan berkaitan dengan upaya percepatan perbaikan gizi	Pengelola KIA dan Gizi, Kader	Puskesmas, Kab/Kota dan Prov	
		Pemberian Suplementasi Gizi, tablet tambah darah, PMT	10	Pembinaan pengetahuan gizi remaja putri yang ada di sekolah dan luar sekolah	Anak Sekolah, Remaja Puteri	Puskesmas, Kab/Kota dan Prov	
			11	Kegiatan pendampingan oleh kader/konselor kepada masyarakat dalam upaya peningkatan percepatan perbaikan gizi	Remaja Puteri, Ibu hamil, Ibu Nifas, Bayi 6-59 bulan	Puskesmas, Kab/Kota dan Prov	

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Ket
		Pelayanan gizi pada 1000 HPK	B Advokasi			
			1 Mendata jumlah balita per kelompok umur di wilayah kerja	PKK, Dasa Wisma	Desa, Kab/Kota	
			2 Mendata jumlah ibu hamil di wilayah kerja	PKK, Dasa Wisma	Desa, Kab/Kota	
			3 Mendata jumlah ibu hamil KEK di wilayah kerja	PKK, Dasa Wisma	Desa, Kab/Kota	
		Pelayanan gizi pada 1000 HPK	4 Mendata jumlah remaja putri di SMP dan SMA di wilayah kerja	PKK, Dasa Wisma	Desa, Kab/Kota	
			5 Mendata jumlah anak gizi kurus (BB/TB) (< -2SD)	Pengelola KIA dan Gizi	Puskesmas, Kec, Kab/Kota, Prov	
			6 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya percepatan perbaikan gizi di masing-masing daerah (yang sudah ada dan yang belum ada)	Sasaran dan lokasi dari no. 1-6 sama	Desa, Kec, Kab/Kota	
		Pelayanan gizi, Bidan, Kader	7 Pelaksanaan advokasi kebijakan yang mendukung percepatan perbaikan gizi	Bupati, Gubernur, Lintas Sektor dan Lintas Program	Kab/Kota dan Prov	
			C Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)			
		Pelayanan gizi, Bidan, Kader	1 Konseling PMBA			
				Pengelola gizi, Lintas Sektor, Badan, Kader	Kab/Kota dan Prov	
			- Pelatihan konseling MPASI berbasis pangan lokal			
			2 Penilaian pertumbuhan balita			
			- Pelatihan antropometri	Petugas Gizi		
			- Pelatihan penilaian status gizi			

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan		Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Ket
				3	Surveilans Gizi			
					- Pelatihan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) SKDN	Lintas Sektor, Badan Keamanan Pangan (BKP)	Puskesmas, Kec, Kab/ Kota, Prov	
					- Bimbingan teknis pada daerah dengan cakupan D/S rendah			
			Pengelola KIA, dan Gizi	4	Orientasi petugas dalam manajemen pemberian:	Lintas Sektor terkait, Badan Keamanan Pangan	Puskesmas, Kec, Kab/ Kota, Prov	
					- TTD pada ibu hamil dan remaja putri			
					- Pemberian kapsul vitamin A			
					- Penatalaksanaan Kretin			
					- Pedoman manajemen Taburia			
				5	Sosialisasi tenaga pelaksana Gizi puskesmas dalam penc.penanggulangan Anemia pd Bumil, Rematri & tata laksana penanggulangan bumil KEK	TPG	Bogor, Bali	
					Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan Anemia pada rematri untuk guru UKS SMP/ sederajat dan SMU/ sederajat	Guru UKS	DKI Jakarta	
				6	Penyusunan KIE dan uji coba KIE pencegahan dan penanggulangan Anemia pd remati			
					Uji Coba buku Panduan Manajemen terintegrasi Suplementasi Vitamin A	TPG	Bogor	

UPAYA PROMOTIF PREVENTIF UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN LINGKUNGAN

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
1	Kesehatan Lingkungan	1 Pelayanan Kesehatan Lingkungan pada desa/kelurahan yang melaksanakan STBM	A Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan) 1 Pelatihan MONEV STBM berbasis web 2 Pelatihan EHRA B Sarana Prasarana Promotif Preventif 1 Pengadaan Sarana Pendukung Perubahan Prilaku Sanitasi 2 Pengadaan Sarana Supply Sanitasi PAMSIMAS 3 Produksi dan Distribusi Media KIE STBM dan PKAM 4 Bimbingan Teknis kegiatan Kesehatan Lingkungan dalam rangka dukungan kegiatan DAK PAM-STBM	Petugas Kabupaten/kota Petugas Kabupaten/kota masyarakat masyarakat Petugas Kabupaten/kota, masyarakat Petugas Kabupaten/kota	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota desa/kelurahan desa/kelurahan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, desa/kelurahan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan		
		2	Pelayanan Kesehatan Lingkungan pada Sarana Air Minum yang dilakukan pengawasan	D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)				
				1	Pelatihan teknis penyehatan air	Petugas Kabupaten/kota	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	
				2	Pelatihan RPAM Komunal	Petugas Kabupaten/kota	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	
				3	Pelatihan MONEV PKAM Berbasis web	Petugas Kabupaten/kota	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	
				E Sarana Prasarana Promotif Preventif				
				1	Pengadaan Sarana Uji Kualitas Air Minum portable (Water Test Kit)	Petugas Kabupaten/kota	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	
		2	Bimbingan Teknis kegiatan Kesehatan Lingkungan dalam rangka Pengawasan sarana air minum oleh sanitarian	Petugas Sanitarian	Puskesmas			
		3	Pelayanan Kesehatan Lingkungan pada tempat-tempat umum	A Pemberdayaan Masyarakat				
				1	Implementasi Penggunaan Alat Sanitarian Kit	Petugas kab/kota, Sanitarian	Dinkes Kab/Kota, Puskesmas	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			B Advokasi				
			1	Pemetaan daerah rentan perubahan iklim	petugas Provinsi, petugas kab/kota	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota	
			C Kemitraan				
			1	Sosialisasi/Jejaring Kemitraan Adaptasi Perubahan Iklim	Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota	
			2	Jejaring Kemitraan TTU	Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			3 Jejaring Kemitraan Penyehatan Pemukiman	Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota		
			4 Pertemuan Sosialisasi SPM Bidang Kesehatan	Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota		
			D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)				
			1 Peningkatan Kapasitas Sanitarian	petugas Sanitarian	Puskesmas		
			2 Orientasi Kesling Tempat-tempat Umum	petugas kab/kota, Sanitarian	Dinkes Kab/Kota, Puskesmas		
			3 Orientasi Layanan kesehatan lingkungan	petugas kab/kota, Sanitarian	Dinkes Kab/Kota, Puskesmas		

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			4	Peningkatan pembinaan dan pengawasan rumah Sehat	petugas kab/kota, Sanitarian	Dinkes Kab/Kota, Puskesmas	
			5	Orientasi Adaptasi Perubahan Iklim bidang Kesehatan bagi petugas kesehatan Kabupaten/Kota	petugas kab/kota, Sanitarian	Dinkes Kab/Kota, Puskesmas	
			E	Sarana Prasarana Promotif Preventif			
			1	Monev dan Pelaporan TTU	petugas Provinsi, petugas kab/kota	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota	
			2	Fasilitasi Peningkatan Kesehatan Lingkungan di Sekolah	petugas Provinsi, petugas kab/kota	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota	
			3	Fasilitasi Peningkatan Kesehatan Lingkungan di Pondok Pesantren	petugas Provinsi, petugas kab/kota	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota	
			4	Pengadaan klinik sanitasi kit	petugas kab/kota	Dinkes Kab/Kota	
			5	Pencetakan Media KIE tentang Penyehatan Tempat-Tempat Umum	petugas kab/kota	Dinkes Kab/Kota	
			6	Pencetakan Media KIE tentang Adaptasi Perubahan Iklim	petugas kab/kota	Dinkes Kab/Kota	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			7	Paket Media KIE Layanan Kesehatan Lingkungan Untuk Puskesmas (Pengadaan Maket Rumah Sehat, Handling Cost Maket Rumah Sehat)	petugas Sanitarian	Puskesmas		
		4	Pelayanan Kesehatan Lingkungan pada Tempat pengelolaan makanan					
			A Pemberdayaan Masyarakat					
			1	Implementasi Pengelolaan HS Pangan di Sekolah dan Rumah Tangga	petugas kab/kota	Dinkes Kab/Kota		
			B Advokasi					
			1	Evaluasi 2015 dan sinergitas rencana kerja dalam penyelenggaraan pangan yang terstandar tahun 2017-2019	petugas Provinsi, petugas kab/kota	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota		
			2	Pemetaan Faktor Risiko Keamanan Pangan	petugas Provinsi, petugas kab/kota	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota		
			3	Verifikasi data e monev HSP dan sosialisasi portal/situs web	petugas Provinsi, petugas kab/kota	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota		
			C Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)					
			1	Peningkatan Kapasitas Petugas Kompeten dalam Pengawasan Keamanan Pangan (Food Inspektur Higiene Sanitasi Pangan)	petugas kab/kota	Dinkes Kab/Kota		
			2	Peningkatan kapasitas penjamah makanan	petugas kab/kota	Dinkes Kab/Kota		

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			D Sarana Prasarana Promotif Preventif			
			1 Fasilitasi Intervensi Pengendalian Faktor Risiko Keamanan Pangan	petugas Provinsi, petugas kab/kota	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota	
			2 Penyediaan Stimulan Deteksi Cepat Cemaran Kualitas Pangan (Food contamination kit dan Food security VVIP Kit)	petugas Sanitarian	Puskesmas	
		5 Pelayanan Kesehatan Lingkungan pada RS yang melakukan pengelolaan limbah medis	A Kemitraan			
			1 Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Limbah Medis	Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota	
			B Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)			
			1 Peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Limbah Medis	petugas Kesehatan	Rumah Sakit	
			C Sarana Prasarana Promotif Preventif			
			1 Monev Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes	petugas Provinsi, petugas kab/kota	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
		6 Pelayanan Kesehatan Lingkungan pada Kab/kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat	A Advokasi 1 Advokasi dan Sosialisasi Program Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kerdaruratan/KLB 2 Advokasi dan Sosialisasi Program Pasar Sehat 3 Advokasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan KKS	Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
			4	Menghadiri Workshop Nasional KKS	Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota	
			5	Workshop Provinsi KKS	Lintas Sektor, Lintas Program, petugas kab/kota	Dinkes Kab/Kota	
			B Kemitraan				
			1	Pertemuan Tim Pembinaan Provinsi dalam penyelenggaraan KKS	Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
			2	Penguatan Kelembagaan Forum Penyelenggaran KKS daerah binaan	Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota	
			C	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)			
			1	Orientasi Peningkatan Kapasitas Sanitarian Bidang Kadaruratan Kesling	petugas kab/kota, Sanitarian	Dinkes Kab/Kota, Puskesmas	
			2	Pelatihan PHAST Pasar Sehat	Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			3	Orientasi Radioland	Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota		
			4	Pelatihan Pembersih Pasar	Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota		
			D Sarana Prasarana Promotif Preventif					
			1	Monitoring dan Evaluasi Kedaruratan	petugas Provinsi, petugas kab/kota	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota		
			2	Monitoring dan Evaluasi Pasar	petugas Provinsi, petugas kab/kota	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota		

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			3	Konsultasi Teknis ke Pusat Bidang Kadaruratan Kesling	petugas Provinsi	Dinkes Provinsi	
			4	Fasilitasi Pembentukan Pokja Pasar	petugas Provinsi	Dinkes Provinsi	
			5	Konsultasi Teknis ke pusat Program Pasar Sehat	petugas Provinsi	Dinkes Provinsi	
			6	Pembinaan Teknis penyelenggaraan KKS di daerah binaan	petugas Provinsi, petugas kab/kota	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota	
			7	Konsultasi Teknis ke pusat dalam penyelenggaraan KKS	petugas Provinsi	Dinkes Provinsi	
			8	pengadaan peralatan pemebrsih pasar dan alat pelindung diri	petugas kab/kota	Dinkes Kab/Kota	
			9	pengadaan alat kedaruratan bidang kesehatan lingkungan (pengadaan alat pasar rakyat)	petugas kab/kota	Dinkes Kab/Kota	
			10	pengadaan peralatan radioland	Lintas Sektor, Lintas Program, petugas Provinsi, petugas kab/kota	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota	

Upaya Promotif Preventif untuk Meningkatkan Kesehatan Kerja dan Olah Raga

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan		Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
1	Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	Pelayanan Kesehatan Kerja Nelayan	A	Pemberdayaan Masyarakat			
					1 Pertemuan peningkatan Upaya Kesehatan Kerja berkaitan dengan kesehatan kerja nelayan	Kader Pos UKK, masyarakat nelayan	Pos UKK yang ada di lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI dan TPI)	
					2 Pembinaan kader Pos UKK Nelayan terintegrasi oleh petugas Puskesmas	Kader Pos UKK, Masyarakat nelayan	Pos UKK, tempat kerja	
					3 Pembentukan Pos UKK Nelayan Terintegrasi oleh Puskesmas/Dinas Kesehatan Kab/Kota	Nelayan	PPI/TPI	
					4 Lokakarya dengan lintas sektor, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk pelayanan kesehatan kerja nelayan	Lintas sektor, dunia usaha, organisasi profesi kesehatan, media massa, stakeholder	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI dan TPI), Puskesmas, Kecamatan	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			B Advokasi				
			1	Pengumpulan, pengolahan dan analisa, serta penyajian data kesehatan kerja nelayan	Masyarakat Nelayan	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI dan TPI)	Mendukung Program Peningkatan Kesehatan Nelayan di Kluster 4 yang termuat dalam Perpres no. 10 tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat
			2	Pelaksanaan surveilans kesehatan kerja nelayan			
			3	Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan kerja nelayan			

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			4	Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja Nelayan ke Dinas Kesehatan Kab/Kota (yang sudah ada dan yang belum ada)	Pemegang kebijakan di wilayah kerja Nelayan	Kantor Dinas Kesehatan Kab/Kota	
			5	Advokasi kebijakan yang mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja Nelayan	Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota		
			6	Pelaksanaan advokasi kepada Kepala Daerah, Pemda dan legislatif dalam mendukung upaya Kesehatan Kerja Nelayan	Kepala Daerah Pemda dan legislatif bersama Dinkes Kab/kota		
			7	Sosialisasi kebijakan yang mendukung upaya Kesehatan Kerja Nelayan			
			8	Penyusunan regulasi untuk mendukung kebijakan dalam upaya peningkatan kesehatan Kesehatan Kerja Nelayan			
			C	Kemitraan			
			1	Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk upaya peningkatan kesehatan kerja nelayan	Dunia usaha		

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			2	Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam upaya peningkatan kesehatan kerja nelayan	Akademisi, NGO/LSM		
			3	Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan kesehatan kerja nelayan	Akademisi, NGO/LSM		
			4	Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama – kemitraan	Akademisi, NGO/LSM		
			5	Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan	Dinas Kesehatan		
			6	Pertemuan diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah	Forum kesehatan		
			D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)				
			1	Pelatihan Kesehatan Kerja Nelayan bagi Petugas Puskesmas yang memiliki wilayah kerja PPI/TPI oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	Petugas Puskesmas	Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota	
			2	Pelatihan Kader Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi Bagi Nelayan oleh petugas Puskesmas	Kader	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI dan TPI), Puskesmas	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
			3	Orientasi/Sosialisasi Kesehatan Kerja dengan nelayan	Nelayan	Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI dan TPI)	
			E Sarana Prasarana Promotif Preventif				
			1	Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) Bagi Nelayan	Nelayan	Pos UKK	
			2	Penyediaan P3K dan P3P di Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi (Pos UKK Terintegrasi) bagi Nelayan	Nelayan	Pos UKK	
			3	Pencetakan / pendistribusian / penayangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang peningkatan kesehatan kerja nelayan melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang			
			4	Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang peningkatan kesehatan kerja nelayan melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang	Nelayan	Pelabuhan, PPI/TPI, Puskesmas dan Pos UKK	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
		2 Pelayanan kesehatan kerja pada pekerja Sektor Informal	A Pemberdayaan Masyarakat 1 Optimalisasi kegiatan berbasis Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi dalam pemberdayaan kader kesehatan kerja dan pekerja berkaitan dengan upaya peningkatan kesehatan kerja pada masyarakat pekerja sektor informal 2 Mengadakan lokakarya dengan lintas sektor, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka gerakan pemberdayaan masyarakat dan mobilisasi sosial untuk pelayanan kesehatan kerja pada pekerja sektor informal 3 Melaksanakan pembinaan kader Pos UKK terintegrasi dan masyarakat pekerja oleh petugas Puskesmas 4 Pembentukan Pos UKK Terintegrasi pada pekerja sektor informal di wilayah kerja Puskesmas sesuai dengan karakteristik bidang pekerjaan yang sejenis yang mempunyai risiko akibat pekerjaan dan tempat kerjanya	Kader, Pekerja LS, Ormas, Dunia Usaha, Media massa, Organisasi profesi, institusi pendidikan Kader, Pekerja Tempat Kerja sejenis yang mempunyai risiko dari pekerjaannya dan tempat kerjanya	Kader, Pekerja Puskesmas, kecamatan Pos UKK, tempat kerja Tempat kerja	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			B Advokasi			
			1 Pengumpulan, pengolahan dan analisa, serta penyajian data kesehatan pekerja sektor informal	Masyarakat pekerja sektor informal	Tempat kerja	
			2 Pelaksanaan surveilans kesehatan pekerja sektor informal	Masyarakat pekerja sektor informal	Tempat kerja	
			3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan kesehatan pekerja sektor informal	Masyarakat pekerja sektor informal	Tempat kerja	
			4 Analisis pelayanan kesehatan pekerja sektor informal	Masyarakat pekerja sektor informal	Tempat kerja	
			5 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada pekerja sektor informal (yang sudah ada dan yang belum ada)			
			6 Advokasi kebijakan yang mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada pekerja sektor informal			

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			7	Pelaksanaan advokasi kepada Kepala Daerah Pemda dan legislatif dalam mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada pekerja sektor informal			
			8	Sosialisasi kebijakan yang mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada pekerja sektor informal			
			9	Penyusunan regulasi untuk mendukung kebijakan dalam upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada pekerja sektor informal			
			C	Kemitraan			
			1	Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk upaya peningkatan kesehatan kerja pada pekerja sektor informal	Dunia usaha		
			2	Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam upaya peningkatan kesehatan kerja pada pekerja sektor informal	Akademisi, NGO/LSM		
			3	Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan kesehatan kerja pada pekerja sektor informal	Akademisi, NGO/LSM		
			4	Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama - kemitraan	Akademisi, NGO/LSM		

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			5	Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan	Dinas Kesehatan	
			6	Pertemuan diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah	Forum kesehatan	
			D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)			
			1	Pelatihan Petugas Puskesmas di bidang kesehatan kerja sebagai penanggungjawab Kesehatan Kerja sektor informal	Petugas Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab/Kota
			2	Pelatihan Kader Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi Bagi pekerja sektor informal	Kader	Puskesmas
			3	Mengadakan Orientasi/Sosialisasi Kesehatan Kerja dengan masyarakat pekerja sektor informal	Kader, Pekerja	Tempat kerja
			E Sarana Prasarana Promotif Preventif			
			1	Penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja sektor informal sesuai dengan risiko yang diakibatkan oleh pekerjaan dan tempat kerjanya oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kab/Kota	Pekerja	Pos UKK
			2	Penyediaan P3K dan P3P di Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi (Pos UKK Terintegrasi) pada pekerja sektor informal oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kab/Kota	Pekerja	Pos UKK

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
			3	Pencetakan / pendistribusian / penayangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang peningkatan kesehatan pekerja sektor informal melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang			
			4	Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang peningkatan kesehatan pekerja sektor informal melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang	Pekerja dan Pemilik Usaha	Tempat kerja	
		3 Pelayanan Kesehatan Bagi Pekerja Perempuan melalui Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)	A	Advokasi			
			1	Pendataan lokasi dan pemetaan Tempat Kerja dengan Pekerja Perempuan	Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja	Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja	
			2	Pelaksanaan surveilans kesehatan kerja pada pekerja perempuan	Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja	Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan Kerja pada pekerja perempuan	Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja	Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja	
			4 Pemetaan kebijakan yang mendukung GP2SP	Bupati/ Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota	Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja	
			5 Advokasi kebijakan yang mendukung GP2SP	Bupati/ Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota	Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja	
			6 Penyusunan regulasi untuk mendukung kebijakan GP2SP	Bupati/ Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota	Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			B Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)				
			1	Pelatihan Konselor ASI bagi kader di tempat kerja dengan pekerja perempuan	Petugas Puskesmas Kader	Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja	
			2	Orientasi GP2SP di tempat kerja	Puskesmas	Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja	
			3	Lokakarya dengan lintas sektor, serikat pekerja, dunia usaha/swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka mendukung GP2SP	Lintas sektor, dunia usaha, organisasi profesi kesehatan, media masa, stakeholder perusahaan	Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja	
			4	Pembinaan Tempat Kerja dengan Pekerja Perempuan	Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat	Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
				Kerja	Kerja	
			C Sarana Prasarana Promotif Preventif			
			1 Penyediaan media KIE diBerkaitan dengan GP2SP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			2 Penyediaan Ruang ASI dan Peralatannya di tempat kerja	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			3 Penyediaan dan distribusi tablet tambah darah bagi pekerja perempuan	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
			4 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang GP2SP	Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja	Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja	
		4 Upaya Pengendalian Dampak Kesehatan Akibat Paparan Merkuri pada Masyarakat	A Pemberdayaan Masyarakat			
			1 Optimalisasi kegiatan berbasis Upaya Kesehatan Kerja secara Terintegrasi dalam pemberdayaan kader kesehatan kerja pada masyarakat sekitar penambang emas skala kecil.	Puskesmas	Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
		Sekitar Penambang Emas Skala Kecil			emas skala kecil	
			2 Pembinaan kader Pos UKK	Pos UKK	Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil	
			3 Pembentukan Pos UKK pada masyarakat penambang emas skala kecil oleh Puskesmas/Dinas Kesehatan Kab/Kota	Pos UKK	Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			B Advokasi				
			1	Pendataan lokasi dan masyarakat berisiko terpapar merkuri di sekitar kawasan penambang emas skala kecil.	Masyarakat sekitar penambang emas skala kecil	Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil	
			2	Pelaksanaan surveilans kesehatan kerja pada pekerja usia reproduktif terpajan merkuri di sekitar penambang emas skala kecil	Masyarakat sekitar penambang emas skala kecil	Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil	
			3	Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan Kerja pada masyarakat penambang emas skala kecil.	Masyarakat sekitar penambang emas skala kecil	Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
					emas skala kecil	
			4 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada masyarakat sekitar penambang emas skala kecil.	Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil	
			5 Advokasi kebijakan yang mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada masyarakat sekitar penambang emas skala kecil.	Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil	
			6 Pelaksanaan advokasi kepada Kepala Daerah Pemda dan legislatif dalam mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada masyarakat sekitar penambang emas skala kecil.	Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
						penambang emas skala kecil	
			7	Sosialisasi kebijakan yang mendukung upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada masyarakat sekitar penambang emas skala kecil.	Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil	
			8	Penyusunan regulasi untuk mendukung kebijakan dalam upaya kesehatan Kesehatan Kerja pada masyarakat sekitar penambang emas skala kecil.	Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil	
			C	Kemitraan			
			1	Pertemuan dengan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan CSR untuk upaya peningkatan kesehatan kerja pada pengendalian lingkungan kerja pada penambang emas skala kecil	Dunia usaha		

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			2	Identifikasi mitra potensial dalam penggunaan dana pajak rokok daerah dalam upaya peningkatan kesehatan kerja pada pengendalian lingkungan kerja pada penambang emas skala kecil	Akademisi, NGO/LSM		
			3	Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya peningkatan kesehatan Kerja pada pengendalian lingkungan kerja pada penambang emas skala kecil	Akademisi, NGO/LSM		
			4	Penyusunan MoU / Perjanjian Kerjasama – kemitraan	Akademisi, NGO/LSM		
			5	Monitoring dan evaluasi kegiatan kemitraan	Dinas Kesehatan		
			6	Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Forum di Kabupaten/Kota yang bergerak di bidang kesehatan di masing-masing daerah	Forum kesehatan		
			D	Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)			
			1	Sosialisasi dampak kesehatan akibat paparan merkuri dan upaya pengendalian lingkungan kerja	Petugas Puskesmas Kader	Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
					emas skala kecil	
			2 Upaya Kesehatan Kerja Nelayan bagi penambang emas skala kecil	Petugas Puskesmas Kader	Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil	
			3 Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam tatalaksana intoksikasi merkuri	Petugas Puskesmas Kader	Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil	
			4 Orientasi/ Sosialisasi Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) pada penambang emas skala kecil.	Puskesmas	Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
					penambang emas skala kecil		
			5	Lokakarya dengan lintas sektor, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka pengendalian pajanan merkuri pada masyarakat sekitar penambang emas skala kecil.	Lintas sektor, dunia usaha, organisasi profesi kesehatan, media masa, stakeholder Kader Pos UKK,	Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil	
			E Sarana Prasarana Promotif Preventif				
			1	Penyediaan media KIE di Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi (Pos UKK Terintegrasi) pada masyarakat sekitar penambang emas skala kecil.	Puskesmas	Puskesmas yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil	
			2	Penyediaan APD di Pos Upaya Kesehatan Kerja Terintegrasi (Pos UKK Terintegrasi) pada masyarakat sekitar penambang emas skala kecil.	Puskesmas	Puskesmas yang terdapat kawasan penambang emas skala	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
						kecil	
			3	Pencetakan/pendistribusian/penayangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang peningkatan kesehatan kerja pada pengendalian lingkungan kerja pada penambang emas skala kecil melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang	Puskesmas	Puskesmas yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil	
			4	Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang peningkatan kesehatan pada penambang emas skala kecil melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media massa, dan media luar ruang		Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang terdapat kawasan penambang emas skala kecil	
		5	Pelayanan Kesehatan Kerja	A	Pemberdayaan Masyarakat		
			1	Pelaksanaan Medical Check UP bagi pekerja	Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja	Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			2 Analisis dan Rekomendasi Hasil Medical Check Up bagi pekerja	Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja	Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja		
			B Advokasi				
			1 Pendataan pekerja di tempat kerja	Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja	Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja		
			2 Pelaksanaan surveilans kesehatan kerja pada pekerja	Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja	Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja		
			3 Penyusunan Instrumen dan profil kesehatan pekerja	Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja	Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja		

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			C Sarana Prasarana Promotif Preventif			
			1 Penyediaan Arsip dan sistem surveilans kesehatan pekerja	Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja	Dinas Kesehatan Kab/Kota, Puskesmas dan Tempat Kerja	
		6 Upaya Pengendalian Bahaya Penggunaan Pestisida Pada Petani	A Pemberdayaan Masyarakat			
			1 Orientasi/ Sosialisasi Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK) pada petani	Kader, Petugas Puskesmas	Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota	
			2 Pembinaan kader Pos UKK	Kader	Pos UKK	
			3 Pembentukan Pos UKK pada masyarakat petanil oleh Puskesmas/Dinas Kesehatan Kab/Kota	Petani	Lokasi Pertanian	
			B Advokasi			
			1 Pendataan lokasi dan masyarakat petani berisiko terpapar penggunaan Pestisida	Masyarakat Petani	Lokasi Pertanian	
			2 Pelaksanaan surveilans kesehatan kerja pada pekerja usia reproduktif terpapar pestisida di sekitar area pertanian	Masyarakat Petani	Lokasi Pertanian	
			3 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan Kerja pada masyarakat petani			

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			C Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)			
			1 Sosialisasi dampak kesehatan akibat paparan pestisida dan upaya pengendalian lingkungan kerja	Petugas Puskesmas, Kader, dan masyarakat petani	Puskesmas, Desa/Kelurahan, area pertanian	
			2 Upaya Kesehatan Kerja bagi petani dalam pengendalian bahaya kimia di pertanian termasuk penggunaan APD			
			3 Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam tatalaksana intoksikasi pestisida	Petugas Puskesmas, Kader	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas	
			4 Lokakarya dengan lintas sektor, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan, dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka pengendalian paparan pestisida pada masyarakat sekitar pertanian	Lintas sektor, Dunia usaha	Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	
			D Sarana Prasarana Promotif Preventif			
			1 Pengembangan media KIE (leaflet, poster, flyer, spanduk, banner, backdrop, billboard, tv spot, radio spot, dan lain-lain) tentang peningkatan kesehatan pada petani melalui media teknologi informasi, media elektronik, media cetak, media			

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
				massa, dan media luar ruang			
			2	Pencetakan dan pendistribusian media KIE pengendalian bahaya penggunaan pestisida pada petani			

UPAYA PROMOTIF PREVENTIF UNTUK MENINGKATKAN PENGENDALIAN KONSUMSI ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU LAINNYA

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
1	Pengendalian Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau Lainnya	1 Upaya Promotif dan Preventif dalam Pengendalian Konsumsi Rokok dan Produk Tembakau	A Advokasi 1 Pengumpulan data mengenai beban konsumsi rokok dan/atau produk tembakau lainnya di masing-masing daerah 2 Pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, baik kebijakan yang sudah ada maupun yang belum ada 3 Rekapitulasi dan penyimpulan data konsumsi rokok dan/atau produk tembakau lainnya, beserta penyakit akibat/berkaitan dengan rokok yang telah tersedia bagi masing-masing daerah bersumber dari data yang telah tersedia seperti Riskesdas, Susenas, SKRT, SDKI, dan lain-lain 4 Rekapitulasi data penyakit berkaitan dengan dampak konsumsi rokok dan/atau produk tembakau lainnya di tingkat Puskesmas dan RS masing-masing daerah	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota Pemda Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lintas Program, Lintas Sektor, Organisasi	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota Puskesmas, RS, Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/	

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
				Profesi, Akademisi	Kota	
			5 Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Data konsumsi rokok dan/atau produk tembakau lainnya, beserta penyakit akibat/berkaitan dengan rokok yang disertai dengan faktor risikonya di masing-masing daerah	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	
			6 Pembuatan buletin/newsletter/factsheet secara berkala terkait trend konsumsi rokok dan/atau produk tembakau lainnya, trend penyakit akibat/berkaitan dengan rokok dan/atau produk tembakau lainnya, beserta dampaknya di masing-masing daerah, baik dampak kesehatan, ekonomi, sosial maupun dampak psikologis dari konsumsi rokok	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	
			7 Analisis situasi dan perencanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya melalui penggunaan dana pajak rokok untuk bidang kesehatan, dengan melibatkan forum kota sehat dan/atau forum kesehatan di masing-masing daerah	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			8 Sosialisasi hasil analisis situasi ke pemangku kepentingan, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa	Pemangku kepentingan, lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa	Tempat Pertemuan/ Dinkes Kab/Kota/ Prov	
			9 Sosialisasi hasil pemetaan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya dengan melibatkan forum kota sehat dan/atau forum kesehatan di masing-masing daerah	Pemda; Pemegang Kebijakan; Forum Kota Sehat; Forum Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	
			10 Pembuatan dan/atau penegakkan regulasi terkait upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah	Pemda; Pemegang Kebijakan	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			<p>11 Melaksanakan pelatihan advokasi kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuk sisha dan e-cigarette</p>	Petugas Dinas Kesehatan, Praktisi Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	
			<p>12 Melaksanakan kegiatan advokasi ke pemangku kepentingan lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa terkait upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuk sisha dan e-cigarette</p>	pemangku kepentingan lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	
			<p>13 Melaksanakan advokasi kepada pemilik/dewan redaksi agar bersedia menayangkan pesan-pesan terkait upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuk sisha dan e-cigarette dengan harga “bersahabat” dan pada waktu/halaman utama</p>	pemilik/dewan redaksi	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			14	Menyelenggarakan lokakarya media tentang gerakan upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuk sisha dan e-cigarette untuk menyebarkan bahaya konsumsinya di daerah masing-masing	Petugas Kesehatan; Masyarakat	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	
			15	Sosialisasi regulasi/peraturan yang terbentuk terkait upaya pencegahan dan penanggulangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah, termasuk sisha dan e-cigarette	Pemerintah, Non Pemerintah, Masyarakat	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	
			B Kemitraan				
			1	Diskusi pemecahan masalah kesehatan antara Dinas Kesehatan Prov/Kab/Ko di masing-masing daerah dengan Forum Kota Sehat di masing-masing daerah	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Forum Kota Sehat	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	
			2	Pengusulan proposal kegiatan oleh lembaga (calon mitra) ke Dinas Kesehatan dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette.	Calon Mitra	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			3 Seleksi proposal dan pengumuman program/proposal terpilih oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/ Kota dan anggota Forum Kota Sehat atau Forum Peduli Kesehatan yang dibentuk di masing-masing daerah	Calon Mitra, Forum Kota Sehat, Forum Peduli Kesehatan	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	
			4 Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota dengan lembaga pelaksana program (mitra) terpilih	Mitra	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	
			5 Implementasi kegiatan lembaga mitra dengan melaksanakan program yang terpilih dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette	Mitra	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	
			6 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan lembaga mitra yang terpilih	Mitra	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			7 Sosialisasi hasil pelaksanaan program terpilih terkait upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, serta laporan pertanggungjawaban lembaga pelaksana program kepada Dinas Kesehatan di masing-masing daerah	Mitra	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	
			8 Evaluasi program kemitraan di masing-masing daerah	Mitra	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	
			9 Pelaksanaan pers briefing dan jumpa pers secara berkesinambungan agar kelompok media massa mengetahui permasalahan dan perkembangan terkini mengenai masalah konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya beserta dampaknya, sehingga terbentuk opini positif yang mendukung upaya pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette	Kelompok Media Massa	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			C Pemberdayaan masyarakat			
			1 Upaya Pemberdayaan Perorangan dalam hal upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok, baik di rumah tangga, sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan secara umum	perorangan, kader, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama, tokoh muda, tokoh politik, tokoh swasta dan tokoh populer di masing-masing daerah	rumah tangga, sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan secara umum	
			2 Upaya pemberdayaan kelompok dalam hal upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok, baik di rumah tangga, sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan secara umum	kelompok atau kelembagaan yang ada di masyarakat seperti:	rumah tangga, sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan	

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
				RT/RW, kelurahan, kelompok adat, organisasi swasta, organisasi wanita, organisasi pemuda dan organisasi profesi)	secara umum	
			3 Upaya pemberdayaan masyarakat dalam hal upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, baik di rumah tangga, sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan secara umum	Masyarakat	rumah tangga, sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan secara umum	

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			4 Optimalisasi kegiatan berbasis Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Pemberdayaan Kader Kesehatan berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette.	Kader Kesehatan	Posyandu	
			5 Optimalisasi kegiatan berbasis Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan pos kesehatan di Pondok Pasantren(Pokestren) berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette	Siswa, santri	Sekolah, Pesantren	
			6 Optimalisasi kegiatan kepemudaan, seperti: pramuka, PMR, karang taruna, pencerah nusantara dan sejenisnya dalam bidang kesehatan sebagai bentuk pemberdayaan partisipasi generasi muda dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette	Masyarakat	sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan secara umum	
			7 Pembiayaan kegiatan yang menunjang operasional Posyandu, Posbindu, PKK, UKS, Poskestren dan organisasi sejenisnya dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk	Posyandu, Posbindu, PKK, UKS, Poskestren dan	Posyandu, Posbindu, PKK, UKS, Poskestren dan	

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			sisha dan e-cigarette	organisasi sejenis	organisasi sejenis	
			8 Kegiatan pendampingan upaya pemberdayaan kelompok oleh kader-kader kesehatan di masing-masing daerah	Kader Kesehatan	Posyandu, Posbindu, PKK, UKS, Poskestren dan organisasi sejenis	
			9 Gerakan memasyarakatkan bahaya merokok dan produk tembakau lainnya dan/atau bahaya bahaya asap rokok	Masyarakat	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	
			10 Menyebarkan pesan-pesan pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan dampak konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette	Masyarakat	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	
			11 Penyuluhan/KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) secara rutin mengenai bahaya merokok dan/atau bahaya asap rokok sampai dengan cara berhenti merokok pada tingkat rumah tangga, sekolah, kantor dan institusi lainnya sampai dengan ke pertemuan tingkat masyarakat di masing-masing daerah	Rumah tangga, sekolah, kantor dan institusi lainnya	Rumah tangga, sekolah, tempat bekerja maupun di lingkungan	

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
						secara umum	
			D	Peningkatan kapasitas SDM			
			1	Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building siswa, mahasiswa, sukarelawan, tenaga kepemudaan, petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, terutama berkenaan bahaya merokok, bahaya asap rokok dan cara berhenti merokok	siswa, mahasiswa, sukarelawan, tenaga kepemudaan, petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan	Tempat Pertemuan/ Dinkes Kab/Kota/ Prov	
			2	Pelatihan dan perbekalan pengetahuan yang berkesinambungan mengenai bahaya rokok dan produk tembakau lainnya, sampai dengan cara berhenti merokok	siswa, mahasiswa, sukarelawan, tenaga kepemudaan, petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga non	Tempat Pertemuan/ Puskesmas /Dinkes Kab/Kota/ Prov	

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
				kesehatan		
			3 Pelaksanaan pelatihan/TOT/Capacity Building petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai materi komunikasi sosial dalam upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya	petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan	Tempat Pertemuan/ Puskesmas /Dinkes Kab/Kota/ Prov	
			4 Pelatihan komunikasi sosial dan pembekalan cara penyusunan strategi menciptakan perubahan perilaku merokok, mengonsumsi sisha atau pun e-cigarette sesuai dengan situasi dan analisis permasalahan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya di masing-masing daerah	petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan	Tempat Pertemuan/ Puskesmas /Dinkes Kab/Kota/ Prov	
			5 Pelatihan teknologi sosial media kepada petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan mengenai upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya	petugas penyuluh, tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan	Tempat Pertemuan/ Puskesmas /Dinkes Kab/Kota/ Prov	

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
				6 Menyelenggarakan sosialisasi/lokakarya/orientasi/sarasehan/semiloka dengan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan dan institusi pendidikan di masing-masing daerah dalam rangka upaya gerakan dan mobilisasi sosial pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya	Organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/swasta, media massa, organisasi profesi kesehatan dan institusi pendidikan	Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota	
			E	Sarana Prasarana Promotif Preventif			
				1 Pemasangan media promosi kesehatan lainnya secara tematik dan serentak di RS, Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes, Posyandu, Posbindu, serta di seluruh kantor pemerintahan/instansi dan mading/billboard/screen alun-alun masing-masing daerah mengenai pengurangan konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette	RS, Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes, Posyandu, Posbindu, serta di seluruh kantor pemerintahan/instansi	RS, Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes, Posyandu, Posbindu, serta di seluruh kantor pemerintahan/instansi	

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
			2	Optimalisasi kegiatan PKRS (Promosi Kesehatan di Rumah Sakit) berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengendalian konsumsi rokok dan produk tembakau lainnya, termasuk sisha dan e-cigarette	Rumah Sakit	Rumah Sakit	
		2 Penetapan Kawasan Tanpa Rokok dan Pengadaan tempat khusus untuk Merokok di Tempat Umum	A	Advokasi			
			1	Menyusun naskah akademik tentang KTR guna memberikan dasar ilmiah dan berbasis data tentang pentingnya membentuk KTR	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	
			2	Menyusun draf rancangan peraturan daerah sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan terkait	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	
			3	Pembahasan dengan DPRD tentang RAPERDA yang telah disusun	Pengambil Kebijakan/ Dinas Provinsi/ Kabupaten Kota	Kantor daerah, DPRD, Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ kota	

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
			4	Penetapan rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi peraturan daerah (Perda)	Pengambil Kebijakan/ Dinas Provinsi/Ka bupaten Kota	Kantor daerah, DPRD, Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ kota	
			5	Menyusun Pedoman Pelaksanaan KTR	Lintas Sektor/ Dinas Provinsi/Ka bupaten Kota	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ kota	
			6	Membuat Penandatanganan KTR pada masing-masing tatanan	fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat proses belajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ kota	

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan			Sasaran	Lokasi	Keterangan
						kerja dan Angkutan Umum		
				B	Kemitraan			
			1	Memfasiltasi masyarakat membentuk kelompok kerja yang memonitor pelaksanaan KTR dalam ruang lingkupnya		Ormas,toma dan toga	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	
			2	Bersama Instansi terkait,menyusun sistem pemantauan pelaksanaan KTR yang melibatkan berbagai Konponen masyarakat		Lintas Sektor/ Dinas Provinsi/Ka bupaten Kota	Lintas Sektor/ Dinas Provinsi/Ka bupaten Kota	
			3	Bekerjasama dengan instansi terkait, melakukan edukasi pada pelanggar KTR tentang dampak dari pelanggaran yang dilakukan secara berkala		Lintas Sektor/ Dinas Provinsi/Ka bupaten Kota	Lintas Sektor/ Dinas Provinsi/ Kabupaten Kota	
				C	Pemberdayaan masyarakat			
			1	Penyebarluasan informasi tentang peraturan penerapan Kawasan tanpa Rokok pada masing-masing SKPD dan Masing-masing tatanan		SKPD di masing-masing tatanan	SKPD di masing-masing tatanan	

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
			2	Kampanye tentang Kawasan tanpa rokok pada masyarakat luas	Masyarakat	Lintas Sektor/ Dinas Provinsi/ Kabupaten Kota	
			3	Menyebarkan Informasi tentang sistem penegakan hukum, pemantauan KTR	SKPD di masing-masing tatanan	Lintas Sektor/ Dinas Provinsi/ Kabupaten Kota	
			D Peningkatan kapasitas SDM				
			1	Pelatihan bagi Pelatih (TOT) tentang KTR pada masyarakat setempat	Petugas Kesehatan di Dinkes Provinsi dan Kab/Kota	Dinas Provinsi/ Kabupaten Kota	
			2	Pelatihan tentang KTR yang dilakukan oleh masyarakat pada kelompoknya	Ormas, toma dan toga	Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota	
			3	Bersama Instansi terkait, meningkatkan kapasitas SDM terkait Pemantauan pelaksanaan KTR	Lintas Sektor/ Dinas	Lintas Sektor/ Dinas	

No.	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan			Sasaran	Lokasi	Keterangan
						Provinsi/ Kabupaten Kota	Provinsi/ Kabupaten Kota	
			E	Sarana Prasarana Promotif Preventif				
			1	Membuat Pesan tentang Kawasan tanpa rokok dalam bentuk media-media promosi	Dinas Provinsi/ Kabupaten Kota	Dinas Provinsi/ Kabupaten Kota		
			2	Pengadaan tempat khusus untuk merokok ditempat umum	Pegawai/ Karyawan, Masyarakat Umum	Tempat kerja dan Fasilitas Umum		
			3	Memfasilitasi masyarakat melaksanakan ketentuan KTR pada ruang lingkup yang telah disepakati	Dinas Provinsi/ Kabupaten Kota	Dinas Provinsi/ Kabupaten Kota		

**UPAYA PROMOTIF PREVENTIF UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN
DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA**

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan			Sasaran	Lokasi	Keterangan				
1	Pelayanan Kesehatan Primer	1 Peningkatan mutu pelayanan kesehatan	A Pemberdayaan Masyarakat									
			1	Pemberdayaan kelompok masyarakat (guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain) dalam rangka peningkatan kesehatan keluarga	Masyarakat, Puskesmas, PKK				Puskesmas, Dinkes Kab/Kota			
			2	Pelaksanaan Program Keluarga Sehat	Masyarakat				Puskesmas			
			3	Pelaksanaan pelayanan preventif karies gigi	Petugas Puskesmas, Masyarakat				Dinkes Kab/Kota			
			B Advokasi									
			1	Workshop teknis SP2TP	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota, Puskesmas							Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi
			2	Penyediaan alat dan bahan pengolah data kesehatan di Puskesmas	Puskesmas							Dinkes Kab/Kota
3	Penyediaan alat dan bahan pengolah data kesehatan di tingkat Kab/Kota dan Provinsi	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota, Puskesmas	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi									

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
			4	Penyediaan alat dan bahan pengambilan dan pengolah data program keluarga sehat	Puskesmas	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			5	Advokasi Dokter Layanan Primer	Organisasi Profesi, FK, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Puskesmas, Pemda Kab/Kota, Pemda Provinsi	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			6	Advokasi pemenuhan kebutuhan sarana prasarana fasilitas pelayanan kesehatan primer sesuai standar Permenkes No. 75 Tahun 2014	Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Pemda Kab/Kota, Pemda Provinsi	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
			7	Advokasi pemenuhan kebutuhan Puskesmas dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan primer	Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Pemda Kab/Kota, Pemda Provinsi	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			8	Advokasi Akreditasi FKTP	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Puskesmas, Pemda Kab/Kota, Pemda Provinsi		
			9	Advokasi dukungan pelaksanaan bebas caries	Pemda	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
			C	Kemitraan			
				1 Pertemuan dengan Dunia Usaha untuk memanfaatkan CSR Perusahaan dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan primer	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota, LSM, Organisasi Masyarakat, Dunia Usaha, PKK, Kecamatan	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
				2 Pertemuan koordinasi dengan dunia usaha (Public Private Partnership) dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit	Dinkes Provinsi, Dinkes Kab/Kota, LSM, Organisasi Masyarakat, Dunia Usaha, PKK, Kecamatan	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			3	Koordinasi dengan sekolah dalam rangka pelaksanaan UKGS	Puskesmas, Sekolah	Dinkes Kab/Kota		
			4	Rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan manajemen Puskesmas (penyusunan RUK dan RPK, Lokakarya Mini, penyusunan PKP)	Petugas Puskesmas, masyarakat, lintas sektor di kecamatan	Puskesmas		
			D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)					
			1	Pelatihan Pendamping Akreditasi FKTP	Dinkes Kab/Kota	Dinkes Provinsi		
			2	Workshop Teknis Akreditasi FKTP	Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi		
			3	Pelatihan manajemen Puskesmas	Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi		
			4	Peningkatan Kemampuan Teknis Keperawatan Kesehatan Masyarakat	Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi		
			5	Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi (PPI) di FKTP	Puskesmas	Dinkes Kab/Kota		
			6	Pelatihan Keselamatan Pasien di FKTP	Puskesmas	Dinkes Kab/Kota		

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
			7	Pembinaan Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota	Puskesmas	Dinkes Kab/Kota	
			8	Pemilihan FKTP Berprestasi	FKTP	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			9	Lokakarya Panduan Praktik Klinis (PPK)	Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Organisasi Profesi, FK	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			10	Workshop pelayanan kesehatan gilut	Tenaga kesehatan gilut, lintas sektor	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			11	Workshop pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat	Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, lintas program dan lintas sektor	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
			E Sarana Prasarana Promotif Preventif				
			1	Penyediaan set alat kesehatan di Puskesmas, reagen, bahan habis pakai, alat penunjang Puskesmas (solar cell, generator, alat kalibrasi, radio komunikasi) untuk peningkatan pelayanan kesehatan primer	Puskesmas	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			2	Penyusunan dan Penggandaan Buku Pedoman dan Media KIE kebijakan pelayanan kesehatan primer	Masyarakat dan petugas kesehatan	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			3	Pembuatan bahan informasi dan komunikasi kepada pengunjung Puskesmas dalam rangka peningkatan mutu pelayanan	Petugas Puskesmas	Puskesmas	
			4	Melaksanakan Penyebarluasan Informasi melalui media cetak dan elektronik tentang pelayanan kesehatan primer	TV Nasional, TV Lokal, Radio, Koran, Majalah, Leaflet, Poster, Media KIE lainnya	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
		2 Peningkatan akses pelayanan kesehatan	A	Pemberdayaan Masyarakat			
			1	Pemberdayaan kelompok masyarakat (guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain) dalam rangka pengobatan/penanganan awal dan pencegahan kerusakan lebih lanjut jika menemui suatu kegawatdaruratan medik sebelum penderita dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat	Masyarakat, Puskesmas, PKK	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
			2	Sosialisasi pelayanan kesehatan di daerah terpencil/sangat terpencil, perbatasan, dan kepulauan	Dinkes Kab/Kota, Organisasi Profesi, Institusi Pendidikan, BPJS Daerah, BNPP Provinsi, BNPP Kab/Kota, Bappeda, BKD, RSUD	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan	
				3 Sosialisasi dan Koordinasi penempatan Tim Nusantara Sehat, tenaga penugasan khusus dan tenaga PTT	Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Pemda Kab/Kota, BKD, Bappeda	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi		
				4 Pelayanan Kesehatan Bergerak	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, RS Vertikal Pusat, RSUD, Puskesmas	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi		
			B Advokasi					
				1 Rekapitulasi data Puskesmas yang mempunyai wilayah terpencil/sangat terpencil	Puskesmas, Kecamatan	Dinkes Kab/kota		
				2 Rekapitulasi data kab/kota yang mempunyai Puskesmas di wilayah terpencil/sangat terpencil	Dinkes Kab/Kota	Dinkes Provinsi		
				3 Analisis situasi dan perencanaan daerah sasaran pelaksanaan pelayanan kesehatan bergerak	Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, RS	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi		

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
				4 Advokasi pembangunan kawasan perbatasan	Kemenkes, Kemen ESDM, Kemenkom-info, Kemdagri, BNPP, BIN, Kemen PU & PR, Telkom, Provider telekomunikasi (Telkomsel, XL, Mentari), Dinkes Kab/Kota wilayah perbatasan, Pemda Kab/Kota, Dinkes Provinsi	Dinkes Provinsi	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan	Sasaran	Lokasi	Keterangan
			5 Advokasi pembangunan sarana penunjang peningkatan akses pelayanan kesehatan di daerah terpencil	Kemenkes, Kemen ESDM, Kemenkom-info, Kemdagri, BNPP, BIN, Kemen PU & PR, Telkom, Provider telekomunikasi (Telkomsel, XL, Mentari), Dinkes Kab/Kota wilayah perbatasan, Pemda Kab/Kota, Dinkes Provinsi	Dinkes Provinsi	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan
			C	Kemitraan			
				1 Rapat koordinasi pembangunan wilayah berwawasan kesehatan	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Bappeda, BKD, Telkom, Dinas PU, BNPP Kab/Kota, BNPP Provinsi	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	
				2 Rapat koordinasi pembangunan kawasan perbatasan dalam menunjang upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, Bappeda, BKD, Telkom, Dinas PU, BNPP Kab/Kota, BNPP Provinsi, Kecamatan, Kelurahan	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi	

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan	
			3	Pertemuan koordinasi antara Puskesmas, UTD, dan RS dalam rangka penandatanganan MoU pelayanan darah (Quick win)	Puskesmas, Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi, RSUD, UTD, RS Vertikal	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi		
			4	Rapat monitoring penempatan Tim Nusantara Sehat, tenaga penugasan khusus, tenaga PTT di tingkat Kab/Kota	Puskesmas, Pemda Kecamatan, Tokoh masyarakat, Tokoh agama, PKK, sekolah	Dinkes Kab/Kota		
			5	Rapat monitoring penempatan Tim Nusantara Sehat, tenaga penugasan khusus, tenaga PTT di tingkat Provinsi	Dinkes Kab/Kota, BKD, Bappeda	Dinkes Provinsi		
			D Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (Kesehatan dan Non Kesehatan)					
			1	Pelatihan PPGD	Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi		

No	Upaya Kesehatan	Jenis Pelayanan	Jenis Kegiatan		Sasaran	Lokasi	Keterangan	
				2 Pelatihan Pelayanan Kesehatan Bergerak (PKB)	Petugas Puskesmas, Dinkes Kab/Kota	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi		
			E Sarana Prasarana Promotif Preventif					
				1 Penyediaan Puskesmas Keliling roda dua dan atau roda empat single gardan dan atau double gardan (sesuai kebutuhan) dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan	Puskesmas	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi		
				2 Penyediaan ambulans transport roda dua dan atau roda empat single gardan dan atau double gardan (sesuai kebutuhan) dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan	Puskesmas	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi		
				3 Penyusunan dan Penggandaan Buku Pedoman dan Media KIE kebijakan peningkatan akses pelayanan kesehatan	Masyarakat dan petugas kesehatan	Dinkes Kab/Kota, Dinkes Provinsi		

F. PENUTUP

Petunjuk teknis penggunaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan masyarakat ini dijadikan acuan bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan upaya pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatannya juga melibatkan partisipasi peran lintas sektor dan lintas program dari berbagai elemen masyarakat, media hingga pemangku kebijakan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK